PERJANJIAN

Nomor : PJJ.06.02.03/00/LPPNPI/12/2016/078

Antara

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA

Dengan

PT BINTANG KOMUNIKASI UTAMA

Tentang

PENGADAAN JASA BERLANGGANAN PENAMBAHAN JARINGAN KOMUNIKASI DOMESTIK DI PERUM LPPNPI

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal dua puluh delapan bulan Desember Tahun dua ribu enam belas (**28-12-2016**) di Tangerang, oleh dan antara :

I. **LUKMAN F. LAISA**, selaku Direktur Teknik Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-234/MBU/11/2015 Tanggal 18 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia dan Keputusan Dewan Pengawas Nomor : KEP-009/DW/XI/2015 Tanggal 01 Desember 2015 tentang Penetapan Nomenklatur Jabatan dan *Key Performance Indicators* (KPI) Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan **PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA**, berkantor pusat di Jalan Ir. H. Juanda, Karang Anyar, Neglasari, Tangerang 15121 – Indonesia, yang anggaran dasarnya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 77 Tahun 2012 Tanggal 13 September 2012;
   - Untuk selanjutnya disebut **"PIHAK PERTAMA"**

II. **ROHADI**, selaku Direktur Utama PT Bintang Komunikasi Utama , dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **PT BINTANG KOMUNIKASI UTAMA,** beralamat di Graha BKU, Jalan Jengki Raya Nomor 43, RT 008/RW 002, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur 13650 - Indonesia, yang anggaran dasarnya tertuang dalam Akta Pendirian Nomor : 01 Tanggal 10 Desember 2001 yang dibuat dihadapan H Djoko Oetoro SH, MM, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Nomor : C-16055 HT.01.01. TH 2003 Tanggal 11 Juli 2003 dan perubahannya yang terakhir dalam Akta Nomor : 20 Tanggal 16 September 2015 yang dibuat dihadapan Jhonni Marihotua Sianturi SH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

	Pihak I	Pihak II
Paraf		

sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor : AHU-AH.01.03-0965363 Tanggal 17 September 2015;
- Untuk selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" dan masing-masing sebagai "**Pihak**", bertindak dalam jabatannya tersebut di atas dengan terlebih dahulu memperhatikan dan menerangkan hal-hal sebagai berikut :

A. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang jasa layanan navigasi penerbangan, membutuhkan penyedia jasa komunikasi domestik antar Kantor Pelayanan Navigasi Penerbangan (KPNP) dengan pesawat udara guna memberikan service link private dan keselamatan penerbangan dalam wilayah Flight Information Region (FIR) Indonesia.

B. Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu Perseroan Terbatas yang dibentuk berdasarkan dan tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia, sebagaimana dinyatakan kepada PIHAK PERTAMA, memiliki keahlian profesional, personel, sumber daya serta kemampuan teknis manajerial, pengalaman dan izin dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang jasa telekomunikasi, menyanggupi dan bersedia memenuhi kebutuhan PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada butir A di atas dan merupakan pemenang lelang dengan ketentuan teknis operasional pengadaan barang/jasa secara elektronik yang telah ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA. Oleh karenanya PIHAK KEDUA setuju untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian ini.

C. Para Pihak menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Perjanjian ini, dan mengikat pihak yang diwakili.

D. Para Pihak mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian ini, masing-masing Pihak :
   1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh Konsultan Hukum dan/atau Advokat;
   2) Menandatangani Perjanjian ini setelah meneliti secara patut;
   3) Telah membaca dan memahami secara seksama serta penuh ketentuan Perjanjian ini; dan
   4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Perjanjian ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini sepakat mengadakan Perjanjian Pengadaan Jasa Berlangganan Penambahan Jaringan Komunikasi Domestik Di Perum LPPNPI (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
DEFINISI

Kecuali makna kalimat menentukan lain, maka kata-kata berikut yang diawali dengan huruf besar yang digunakan dalam Perjanjian ini mempunyai arti sebagai berikut :

	Pihak I	Pihak II
Paraf		

a. **ATC** adalah *Air Traffic Controller* atau pemandu/pengendali lalu lintas udara.

b. **ATS** adalah *Air Traffic Services*/layanan lalu lintas udara.

c. ***Automatic Dependent Surveillance Broadcast* (ADS-B)** adalah jaringan komunikasi domestik dengan *minimum bandwidth* 64 kbps yang berfungsi sebagai sarana komunikasi data ADS-B dari peralatan *ground station* ADS-B ke pusat ATC.

d. ***Aeronautical Telecommunication Network* (ATN)** adalah jaringan komunikasi dengan *minimum bandwidth* 64 kpbs untuk data *interoperability* antar unit ATS dengan perangkat jaringan komunikasi yang terintegrasi dengan peralatan ATN/AMHS dan jenis *interface card* yang sesuai (compatible) dengan *interface* X.400.

e. ***Aeronautical Fixed Telecommunication Network*** adalah jaringan komunikasi data antar bandar udara untuk pengiriman dan penerimaan berita-berita penerbangan dalam bentuk Teletype (TTY).

f. ***Direct Speech* (DS)** adalah jaringan komunikasi domestik dengan *minimum bandwidth* 9,6 kbps yang berfungsi sebagai sarana komunikasi suara antar unit ATC untuk keperluan koordinasi di satu bandar udara dengan unit ATC di bandar udara lain dengan sistem hotline, dengan perangkat yang terintegrasi dengan peralatan *Voice Communication Switching System* (VCSS).

g. ***Radar Data* (RD)** adalah jaringan komunikasi domestik dengan *minimum bandwidth* 19,2 kbps yang berfungsi sebagai komunikasi data radar (RD) dari peralatan radar ke pusat ATC.

h. ***Remote Control* (RC)** adalah jaringan komunikasi domestik yang berfungsi sebagai komunikasi remote control (RC) dari lokasi peralatan peralatan ke pusat ATC dengan perangkat jaringan komunikasi yang terintegrasi dengan peralatan *Remote Control & Monitoring System* (RCMS).

i. ***Teletype* (TTY)** adalah jaringan komunikasi domestik dengan *minimum bandwidth* 2,4 kbps yang berfungsi sebagai sarana komunikasi data TTY antar bandar udara dengan *interface* perangkat jaringan komunikasi yang terintegrasi dengan peralatan *Automatic Message Switching Centre* (AMSC).

j. ***Very High Frequency Extended Range & High Frequency Extended Range* (VHF & HF - ER)** adalah jaringan komunikasi domestik (VHF-ER dengan *minimum bandwidth* 9,6 kbps dan HF-ER dengan *minimum bandwidth* 128 kbps) yang berfungsi sebagai sarana komunikasi suara *ground to air* dan *air to ground* antara ATC dengan Pilot, dengan peralatan yang terintegrasi dengan peralatan *Voice Switching Control System* (VSCS).

k. **Fasilitas Pelanggan** adalah semua peralatan, personel dan tempat yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA, yang diperlukan agar PIHAK KEDUA dapat memberikan layanan Jasa Berlangganan dan Aplikasi.

	Pihak I	Pihak II
Paraf		

l. **Fasilitas Jaringan** adalah peralatan VSAT berikut transponder dalam kondisi baru dan kelengkapannya melalui satelit dan/atau jaringan terrestrial kabel laut/*fiber optic* yang dapat diintegrasikan dengan seluruh peralatan ATS, termasuk personel yang disediakan PIHAK KEDUA di lokasi/area kerja PIHAK PERTAMA (tidak termasuk Fasilitas Pelanggan dalam Perjanjian ini) yang dipakai untuk penyediaan Jasa Berlangganan dan Aplikasi.

m. **Lokasi Pekerjaan** adalah lokasi pelaksanaan layanan Jasa Berlangganan dan Aplikasi yang mencakup lokasi fisik tunggal atas satu atau lebih koneksi di wilayah FIR Indonesia atau sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pengadaan atau Dokumen Penawaran, dengan pelaksanaan *Site Acceptance Test* di Kantor Cabang JATSC, MATSC, Batam, Medan, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, Manado, Jayapura dan Biak yang berada dibawah pengelolaan PIHAK PERTAMA.

n. **Pekerjaan** adalah seluruh rangkaian pekerjaan dari Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Pemasangan/Instalasi, Pekerjaan Uji Coba Peralatan, *Shadow Operation* dan *Switch Over*, *Site Training*, *Site Acceptance Test*, Pemeliharaan Peralatan, Dokumentasi berikut layanan Jasa Berlangganan dan Aplikasi di Lokasi Pekerjaan yang pelaksanaannya wajib mengacu/memenuhi spesifikasi teknis dan spesifikasi operasional serta persyaratan lain-lain sebagaimana ditentukan dalam hirarki dokumen acuan pelaksanaan Pekerjaan pada Pasal 3 Perjanjian ini.

o. **Jasa Berlangganan dan Aplikasi** adalah jasa sirkuit langganan digital berkecepatan tinggi dengan jenis aplikasi *Radar Data* (**RD**), *VHF & HF Extended Range* (**ER**), *Direct Speech* (**DS**), Teletype (**TTY**), *Automatic Dependent Surveillance Broadcast* (**ADS-B**) dan *Aeronautical Telecommunication Network* (**ATN**), Remote Control (**RC**), yang memberikan *service link private* antar unit ATS di dalam wilayah FIR Indonesia menggunakan Fasilitas Jaringan, selama 24 (dua puluh empat) jam secara terus menerus dalam 7 (tujuh) hari per minggu, dengan kemampuan aplikasi komunikasi data, suara maupun gambar.

p. **Direksi Pekerjaan** adalah Pegawai PIHAK PERTAMA yang ditunjuk untuk mengawasi pelaksanaan Pekerjaan agar sesuai dengan persyaratan teknis dengan memberikan saran/persetujuan/perintah mengenai pelaksanaan Pekerjaan, mengkoordinasikan semua masukan-masukan teknis/operasional yang diperlukan untuk hasil Pekerjaan yang baik sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.

q. **Tanggal Koneksi** adalah tanggal dimulainya penerimaan Jasa Berlangganan dan Aplikasi di Lokasi Pekerjaan, yang ditentukan dan disepakati Para Pihak dalam Berita Acara Layak Operasi, setelah beroperasinya jaringan komunikasi domestik dengan baik dan benar.

r. **Pajak** adalah segala macam pajak termasuk pajak penjualan, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak pendapatan, retribusi, pungutan dan bea (termasuk impor, ekspor, meterai dan transaksi), baik yang dibayar dimuka atau sebaliknya, bersama dengan bunga, denda dan ongkos yang berkaitan dengan itu semua, kecuali yang dibebankan pada keuntungan bersih Para Pihak.

Paraf

Pihak I	Pihak II

Pasal 2
LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya sebagaimana disebut di atas menunjuk PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima penunjukan tersebut dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pekerjaan **Pengadaan Jasa Berlangganan Jaringan Komunikasi Domestik di Perum LPPNPI**, dengan Lingkup Pekerjaan sebagai berikut :

a. Pekerjaan Persiapan, yang meliputi *Site Survey* dan *Kick Off Meeting*;
b. Pekerjaan Pemasangan/Instalasi;
c. Pekerjaan Uji Coba Peralatan, *Shadow Operation* dan *Switch Over*;
d. *Training*;
e. *Site Acceptance Test*;
f. Pemeliharaan Peralatan;
g. Dokumentasi; dan
h. Jasa Berlangganan dan Aplikasi (RD, VHF & HF-ER, DS, TTY, ADS-B, ATN dan RC) dengan koneksi sebagaimana dijelaskan dalam Dokumen Penawaran PIHAK KEDUA.

Pasal 3
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

(1) Dokumen-dokumen berikut merupakan acuan pelaksanaan Pekerjaan yang termasuk tetapi tidak terbatas pada lampiran-lampiran dalam Perjanjian ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, yaitu sebagai berikut :
   a. Addendum Perjanjian dan berita acara perubahan Pekerjaan (apabila ada);
   b. Pokok Perjanjian;
   c. Surat Penunjukan Nomor : 06.02.03/00/LPPNPI/12/2016/452 Tanggal 22 Desember 2016;
   d. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : BA-2/38/19/11/2016 Tanggal 21 November 2016;
   e. Berita Acara Hasil Klarifikasi, Negosiasi Teknis dan Harga Nomor : BA-2/38/17/11/2016 Tanggal 18 November 2016 beserta lampirannya yang memuat rincian anggaran biaya setelah negosiasi;
   f. Dokumen Penawaran dari PIHAK KEDUA untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Berlangganan Penambahan Jaringan Komunikasi Domestik Di Perum LPPNPI yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut "**Dokumen Penawaran**";
   g. Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Nomor : DOK-2/38/04/10/2016 Tanggal 06 Oktober 2016 dan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Nomor : BA-2/38/05/10/2016 Tanggal 11 Oktober 2016 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Berlangganan Penambahan Jaringan Komunikasi Domestik Di Perum LPPNPI yang memuat Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pelaksanaan Pekerjaan, selanjutnya disebut "**Dokumen Pengadaan**"; dan
   h. Dokumen-dokumen lainnya, seperti jaminan-jaminan dan/atau dokumen terkait pelaksanaan Perjanjian.

Paraf

Pihak I	Pihak II

(2) Dokumen acuan pelaksanaan Pekerjaan dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan apabila ditemukan pertentangan antara ketentuan dalam satu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen lainnya, maka apabila PIHAK PERTAMA tidak memberikan klarifikasi atau perintah yang diperlukan terhadap pertentangan dimaksud, yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) Pasal ini dengan berdasar pada ketentuan dan/atau kebijakan yang berlaku serta ditetapkan.

(3) Dalam hal tidak diatur dalam Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat memberlakukan ketentuan yang tercantum dalam peraturan yang berlaku di PIHAK PERTAMA, petunjuk-petunjuk dan peringatan-peringatan lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA untuk mensukseskan Pekerjaan dan mencapai maksud tujuan dibuatnya Perjanjian ini.

Pasal 4
BIAYA PEKERJAAN

Biaya pelaksanaan/penyelesaian Pekerjaan pada Perjanjian ini telah disepakati oleh Para Pihak sebesar Rp 5.030.000.000,- (lima miliar tiga puluh juta Rupiah) sudah termasuk PPN, semua bea dan biaya-biaya lainnya dengan rincian anggaran biaya sebagaimana dijelaskan pada lampiran Perjanjian ini.

Pasal 5
TATA CARA PEMBAYARAN

(1) Biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) Perjanjian ini akan dibayarkan secara bertahap selama Jangka Waktu Sewa jaringan komunikasi domestik oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp 419.166.666,- (empat ratus sembilan belas juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam Rupiah) per bulan sudah termasuk Pajak setelah Jasa Pemeliharaan Peralatan, Dokumentasi berikut Jasa Berlangganan dan Aplikasi seluruh Lokasi Pekerjaan dilaksanakan PIHAK KEDUA dengan baik dan benar dan berdasarkan realisasi pemakaian setiap jenis aplikasi link jaringan komunikasi sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Layak Operasi yang ditandatangani Para Pihak.

(2) Tagihan bulanan pembayaran Biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini wajib disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan surat permohonan pembayaran dilengkapi data pendukung sebagai berikut :
   a. Invoice penagihan;
   b. Kuitansi rangkap 3 (tiga) bermeterai Rp 6.000,-;
   c. Faktur Pajak;
   d. Fotokopi Perjanjian ini dan beserta perubahannya apabila ada;
   e. Fotokopi Berita Acara Layak Operasi yang telah ditandatangani Para Pihak khusus untuk penagihan pertama kali biaya Jasa Berlangganan dan Aplikasi;

	Pihak I	Pihak II
Paraf		

f. Fotokopi Dokumentasi Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Perjanjian ini khusus untuk penagihan pertama kali biaya Jasa Berlangganan dan Aplikasi;
g. Laporan Pekerjaan yang telah disetujui wakil Para Pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Perjanjian ini;
h. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang telah ditandatangani Para Pihak.

(3) Surat permohonan pembayaran beserta data pendukung pada ayat (2) Pasal ini wajib disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA ke alamat sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 ayat (4) huruf a Perjanjian ini.

(4) Penagihan pembayaran Biaya Pekerjaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini wajib diproses oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.

(5) Setelah dokumen penagihan pembayaran Biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima PIHAK PERTAMA dengan benar dan lengkap, pembayaran atas Biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dengan cara transfer dana ke nomor rekening Bank milik PIHAK KEDUA, yaitu sebagai berikut :

Bank	**: Bank Mandiri**
Cabang	**: KCP Jakarta Bendungan Hilir**
Nomor Rekening	**: 1220007095972**
Atas Nama	**: Bintang Komunikasi Utama**

dengan ketentuan bahwa pembayaran melalui transfer bank tersebut baru dianggap berlaku dan sah apabila dana yang ditransfer telah diterima oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 6
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

(1) Perjanjian ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Perjanjian oleh Para Pihak sebagaimana disebut pada awal Perjanjian.

(2) Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan pada Perjanjian ini disepakati selama 455 (empat ratus lima puluh lima) hari kalender, yang terdiri dari :

a. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan yang meliputi Persiapan, Pemasangan/Instalasi, Uji Coba Peralatan, *Shadow Operation* dan *Switch Over*, *Training*, *Site Acceptance Test* (selanjutnya disebut "**Jangka Waktu Pemasangan**") selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini yaitu tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017;

b. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan yang meliputi Pemeliharaan Peralatan, Dokumentasi dan Jasa Berlangganan dan Aplikasi (selanjutnya disebut "**Jangka Waktu Sewa**") selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender terhitung mulai Tanggal Koneksi yang dituangkan dalam Berita Acara Layak Operasi yang ditandatangani Para Pihak.

	Pihak I	Pihak II
Paraf		

(3) Setelah berakhirnya Jangka Waktu Sewa pada ayat (2) huruf b Pasal ini, PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan dan menanggung seluruh biaya Pekerjaan Pembongkaran Peralatan (fasilitas jaringan komunikasi berikut transponder dan kelengkapan lainnya).

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Selain sebagaimana ditentukan Pasal lain dalam Perjanjian ini, hak-hak dan kewajiban-kewajiban PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :

a. PIHAK PERTAMA berhak mengawasi dan melakukan inspeksi terhadap jalannya pelaksanaan Pekerjaan, pada setiap Lingkup Pekerjaan, di seluruh bagian Lokasi Pekerjaan, melalui Direksi Pekerjaan atau perwakilannya dengan tanpa mengganggu atau menghambat kinerja PIHAK KEDUA;

b. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan peralatan/material dalam kondisi baru (brand new), mutu/kualitas, baik dan benar sesuai volume, spesifikasi teknis maupun operasional peralatan sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Penawaran;

c. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan ketepatan waktu penyelesaian Pekerjaan dari PIHAK KEDUA sesuai Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Perjanjian ini;

d. PIHAK PERTAMA berhak menolak pada saat diserahkannya hasil Pekerjaan Persiapan, Pemasangan/Instalasi, Uji Coba Peralatan, *Shadow Operation* dan *Switch Over*, *Training*, *Site Acceptance Test* oleh PIHAK KEDUA apabila hasil Pekerjaan dimaksud tidak sesuai dengan rencana kerja dan syarat-syarat atau spesifikasi teknis maupun operasional peralatan atau persyaratan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan atau Dokumen Penawaran;

e. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan dari PIHAK KEDUA ketersediaan jaringan komunikasi domestik dengan skema *end-to-end service* sesuai spesifikasi teknis/ operasional dan persyaratan lainnya dalam Dokumen Pengadaan dan Dokumen Penawaran;

f. PIHAK PERTAMA berhak memperoleh jasa Pemeliharaan Peralatan dan perbaikan atas kerusakan atau gangguan jaringan komunikasi domestik dari PIHAK KEDUA dalam waktu maksimum 1 x 24 Jam berdasarkan data dari *network monitoring system* milik PIHAK KEDUA tanpa perlu pemberitahuan lisan/tertulis dari PIHAK PERTAMA sebelumnya;

g. PIHAK PERTAMA berhak mengawasi pelaksanaan penyediaan layanan Jasa Berlangganan dan Aplikasi oleh PIHAK KEDUA, dan bekerjasama dengan PIHAK

	Pihak I	Pihak II
Paraf		

KEDUA dalam menguji dan mengkonfirmasi pengoperasian layanan jaringan komunikasi domestik dengan tepat;

h. PIHAK PERTAMA berhak memberikan peringatan tertulis dan mengenakan Denda/Sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila pelaksanaan Pekerjaan tidak sesuai dengan yang disepakati dalam Perjanjian ini;

i. PIHAK PERTAMA berkewajiban melaksanakan pembayaran atas Biaya Pekerjaan kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Tata Cara Pembayaran sebagaimana ditentukan Pasal 5 Perjanjian ini.

(2) Selain sebagaimana ditentukan Pasal lain dalam Perjanjian ini, hak-hak dan kewajiban-kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :

a. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk tunduk pada syarat dan ketentuan Perjanjian ini;

b. PIHAK KEDUA berkewajiban menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Direksi Pekerjaan/pengawas pekerjaan serta instansi terkait lainnya untuk mensukseskan Pekerjaan;

c. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan dan menyelesaikan seluruh rangkaian Pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab selama Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana ditentukan Pasal 6 Perjanjian ini berdasarkan rencana kerja/syarat teknis Dokumen Pengadaan dan sesuai Dokumen Penawaran, termasuk dalam menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke dan dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan dalam pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan Pekerjaan yang dirinci dalam Perjanjian ini;

d. PIHAK KEDUA berkewajiban menyiapkan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan dan pemeliharaan meliputi hardware maupun software, peralatan kerja (toolkit) dan alat-alat pengukur (test and measuring equipment) dalam keadaan baik serta membuat los direksi, los kerja dan gudang-gudang bahan atau alat-alat kerja apabila diperlukan;

e. PIHAK KEDUA berkewajiban mengamankan dengan baik peralatan yang diadakan selama Jangka Waktu Pemasangan dari kemungkinan kerusakan, kehilangan, pencurian dan gangguan pihak ketiga agar ketepatan waktu penyerahan peralatan tetap sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini;

f. PIHAK KEDUA berhak berkonsultasi dengan Direksi Pekerjaan/pengawas lapangan yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dalam menetapkan tahapan-tahapan pelaksanaan Pekerjaan;

g. Apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e Pasal ini, maka PIHAK KEDUA berkewajiban segera memperbaiki/melengkapi kekurangan yang terdapat pada hasil Pekerjaan Persiapan, Pemasangan/Instalasi, Uji Coba Peralatan,

	Pihak I	Pihak II
Paraf		

Shadow Operation dan *Switch Over*, *Training*, *Site Acceptance Test* disesuaikan dengan rencana kerja dan syarat-syarat, spesifikasi teknis maupun operasional peralatan atau persyaratan teknis lainnya dalam Dokumen Pengadaan atau Dokumen Penawaran tanpa perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan;

h. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memindahkan dan mengeluarkan peralatan yang diadakan dari Lokasi Pekerjaan dengan biaya sendiri dalam waktu 1 x 24 jam apabila peralatan yang dimaksud tidak mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan karena sebab yang dapat dipertanggungjawabkan;

i. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan layanan jaringan komunikasi domestik kepada PIHAK KEDUA dengan dukungan tenaga ahli dan organisasi manajemen proyek sesuai Dokumen Penawaran;

j. PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan perbaikan terhadap setiap kerusakan/gangguan pada layanan jaringan komunikasi domestik pada PIHAK PERTAMA dan melakukan kegiatan pemeliharaan jaringan komunikasi tanpa mengurangi *Service Level Guarantee* atas layanan yang diberikan kepada PIHAK PERTAMA.

k. PIHAK KEDUA berkewajiban memenuhi *Service Level Guarantee* dan memberikan akses kepada PIHAK PERTAMA terhadap sistem *monitoring* yang memberikan penjelasan dari tingkat pelayanan jaringan komunikasi domestik kepada PIHAK PERTAMA setiap bulannya.

l. PIHAK KEDUA berkewajiban segera melaksanakan pembongkaran Fasilitas Jaringan pada saat berakhirnya Jangka Waktu Sewa sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf b Perjanjian ini atau karena berakhirnya/adanya pemutusan Perjanjian ini dengan melakukan koordinasi dengan perwakilan PIHAK PERTAMA di setiap Lokasi Pekerjaan.

m. PIHAK KEDUA berkewajiban mengadakan rapat koordinasi dan evaluasi bersama PIHAK PERTAMA setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan tujuan meningkatkan/mempertahankan kualitas hasil pelaksanaaan Pekerjaan.

n. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan atas seluruh data, informasi dan/atau keterangan lainnya yang digunakan terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan dengan tidak menyebarluaskan, menyimpan, maupun menggunakan sebagian atau seluruh data, informasi dan/atau keterangan tersebut di atas untuk kepentingan sendiri maupun orang lain kecuali telah mendapat izin tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA atau informasi yang telah dipublikasikan atau tidak dinyatakan rahasia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

o. PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran atas Biaya Pekerjaan dari PIHAK PERTAMA berdasarkan Tata Cara Pembayaran sebagaimana ditentukan Pasal 5 Perjanjian ini;

	Pihak I	Pihak II
Paraf		

p. PIHAK KEDUA setuju bahwa selama pelaksanaan Perjanjian, PIHAK KEDUA dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan Perjanjian ini;

q. PIHAK KEDUA dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dengan kegiatan yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 8
JAMINAN PELAKSANAAN

(1) PIHAK KEDUA telah menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA Jaminan Pelaksanaan berupa Uang Tunai yang telah disetorkan ke rekening PIHAK PERTAMA sebesar 5% (lima perseratus) dari Biaya Pekerjaan yaitu sebesar Rp 251.500.000,- (dua ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah).

(2) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memiliki masa berlaku selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender atau sampai dengan setelah diserahterimakannya Pekerjaan Persiapan, Pemasangan/Instalasi, Uji Coba Peralatan, *Shadow Operation* dan *Switch Over*, *Site Training* dan *Site Acceptance Test* dalam Jangka Waktu Pemasangan.

(3) Jaminan Pelaksanaan pada ayat (1) Pasal ini wajib ditambahkan nilainya oleh PIHAK KEDUA apabila terjadi pekerjaan tambah yang menyebabkan terjadinya perubahan Biaya Pekerjaan pada Perjanjian ini.

(4) Jaminan Pelaksanaan dapat diambil kembali oleh dan/atau dikembalikan kepada PIHAK KEDUA setelah Pekerjaan Persiapan, Pemasangan/Instalasi, Uji Coba Peralatan, *Shadow Operation* dan *Switch Over*, *Site Training* dan *Site Acceptance Test* diselesaikan dengan baik dan benar sesuai syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini yang dinyatakan dalam Berita Acara Layak Operasi.

(5) PIHAK PERTAMA berhak atas Jaminan Pelaksanaan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut :

a. Jangka Waktu Pemasangan telah terlampaui dan PIHAK KEDUA belum menyelesaikan Pekerjaan Persiapan, Pemasangan/Instalasi, Uji Coba Peralatan, *Shadow Operation* dan *Switch Over*, *Site Training* dan *Site Acceptance Test* dengan baik dan benar sesuai ketentuan Perjanjian ini karena ketidakmampuan/kesalahan/kelalaian PIHAK KEDUA.

b. PIHAK KEDUA lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya baik sebagian maupun seluruhnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

c. PIHAK KEDUA mengalihkan tanggung jawab pelaksanaan seluruh maupun sebagian pekerjaan utama pada Perjanjian ini dengan mensubkontrakkan kepada pihak ketiga tanpa seizin dan sepengetahuan PIHAK PERTAMA.

	Pihak I	Pihak II
Paraf		

d. PIHAK KEDUA tidak menambah nilai Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dipersyaratkan ayat (3) Pasal ini.

Pasal 9
TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN PEKERJAAN

Dalam melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, PIHAK KEDUA berkewajiban menyelesaikan dan/atau bertanggung jawab penuh terhadap :

a. Ketelitian/kebenaran, kerapihan hasil Pekerjaan sesuai dengan gambar rencana, peraturan dan persyaratan, gambar-gambar pelaksanaan serta petunjuk-petunjuk Direksi Pekerjaan;

b. Pengangkutan dan ketersediaan tenaga kerjanya, *log book*, tanda pengenal para pekerja, perlengkapan standar Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);

c. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), cidera, pertolongan dan pengobatan para pekerjanya kaitannya dalam pelaksanaan Pekerjaan;

d. Pengemasan, pemuatan, pengangkutan, penerimaan, pembongkaran, penyimpanan dan keamanan terhadap material/peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan;

e. Keamanan bahan dan peralatan yang digunakan selama pelaksanaan Pekerjaan;

f. Semua bentuk kerugian materiil yang dialami PIHAK PERTAMA karena kerusakan/kehilangan material atau peralatan milik PIHAK PERTAMA di Lokasi Pekerjaan akibat kelalaian/kesalahan PIHAK KEDUA dalam pemanfaatan material/peralatan dimaksud untuk pelaksanaan Pekerjaan, oleh karena itu PIHAK KEDUA wajib mengganti kerugian dimaksud;

g. Semua bentuk kerusakan dan kerugian yang dialami pihak ketiga yang diakibatkan oleh kesalahan/kelalaian atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan, oleh karena itu PIHAK KEDUA menjamin dan membebaskan PIHAK PERTAMA dari semua tanggungjawab, biaya, tuntutan/gugatan hukum di luar/dalam pengadilan beserta pengeluaran (termasuk biaya hukum) yang mungkin timbul di kemudian hari; dan

h. Pengurusan perizinan, lisensi dan persetujuan yang diperlukan di instansi yang berwenang sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan beserta seluruh biaya perizinan yang ditimbulkan.

Pasal 10
TINGKAT LAYANAN DAN JAMINAN OPERASI

(1) PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan Tingkat Layanan (Service Level Guarantee) untuk layanan jaringan komunikasi domestik dan Fasilitas Jaringan di Lokasi Pekerjaan dengan memenuhi minimum *Service Level Guarantee* yang telah disepakati bersama yaitu 99,96% atau *down time* per hari tidak lebih dari 35,04 detik atau *down time* akumulatif per bulan tidak lebih dari 17,52 menit untuk setiap aplikasi.

	Pihak I	Pihak II
Paraf		

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan dukungan kepada PIHAK PERTAMA berkenaan dengan pelaporan masalah teknis dan operasional terkait layanan Pekerjaan, oleh karenanya PIHAK KEDUA berkewajiban mengoperasikan helpdesk 24 jam/7 hari dan menyediakan tenaga teknis di Lokasi Pekerjaan, selanjutnya bertanggung jawab penuh untuk menugaskan personelnya dan menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

(3) PIHAK KEDUA menjamin bahwa Fasilitas Jaringan yang digunakan untuk pelaksanaan Pekerjaan memenuhi spesifikasi teknis dan spesifikasi operasional sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, serta menjamin bahwa fasilitas jaringan komunikasi yang beroperasi (existing) dan peralatan-peralatan lain tidak akan terganggu sampai dengan selesainya masa transisi, uji coba serta *shadow operation*.

(4) PIHAK KEDUA menjamin akan bertanggung jawab penuh dan membebaskan PIHAK PERTAMA terhadap klaim kerugian, kerusakan, semua tanggungjawab, kewajiban, denda, biaya-biaya, tuntutan/gugatan di dalam dan di luar pengadilan, pengeluaran (termasuk biaya hukum) yang dikenakan/ditujukan kepada PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA dari pihak ketiga yang timbul karena kesalahan/kelalaian dan/atau dari pelanggaran yang dilakukan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Perjanjian ini.

(5) PIHAK KEDUA menjamin dan membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan tanggung jawab atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) meliputi namun tidak terbatas pada paten, hak cipta, merek dagang atau hak rancangan industri yang timbul karena penggunaan barang/peralatan untuk setiap penemuan yang telah terdaftar atau belum terdaftar yang dipergunakan PIHAK KEDUA atau yang diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan dalam Perjanjian ini, oleh karenanya PIHAK KEDUA berkewajiban mengganti biaya-biaya/ongkos yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA untuk melawan setiap tuntutan dan tindakan pihak ketiga sebagai akibat dari pelanggaran HAKI yang dilakukan atau diduga dilakukan PIHAK KEDUA.

(6) Kewajiban dan pertanggung jawaban utama PIHAK KEDUA adalah sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian ini dan semua pernyataan, syarat, jaminan dan ketentuan lain tersurat atau tersirat baik berdasarkan undang-undang yang berlaku atau Dokumen Penawaran.

(7) PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan depo logistik dan teknisi yang berkemampuan melaksanakan pemeliharaan termasuk suku cadang peralatan, suku cadang modul dan suku cadang komponen untuk lokasi Kantor Cabang JATSC Jakarta, MATSC Makassar, Batam, Medan, Kupang, Balikpapan, Manado, Jayapura dan Ambon yang berada dibawah pengelolaan PIHAK PERTAMA.

	Pihak I	Pihak II
Paraf		

Pasal 11
KERAHASIAAN

(1) Para Pihak sepakat bahwa segala informasi dan keterangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, data penerbangan milik PIHAK PERTAMA dan dokumen mengenai data bisnis, jasa, produk kerja, rencana kerja atau strategi, biaya, administrasi keuangan dan rahasia-rahasia lainnya milik masing-masing Pihak yang timbul atau yang mungkin didapatkan Pihak lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia (untuk selanjutnya disebut "**Informasi Rahasia**").

(2) Para Pihak sepakat selama berlakunya Perjanjian ini dan setiap waktu sesudahnya untuk menjaga kerahasiaan serta tidak akan menyebarluaskan dan/atau menggandakan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak ketiga manapun.

(3) Apabila salah satu Pihak dan/atau karyawannya dan/atau pihak yang berada dalam pengawasannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, maka pihak yang melanggar ketentuan wajib bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang nyata-nyata ditimbulkan. Tanpa mengurangi hak Pihak yang dirugikan dapat memutuskan Perjanjian ini tanpa tuntutan dari Pihak lainnya.

(4) Ketentuan Kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak berlaku bagi Informasi Rahasia :

a. Wajib dibuka oleh Undang-undang yang berlaku, Pengadilan dan/atau Instansi Pemerintah yang berwenang, sepanjang hal tersebut diikuti dengan pemberitahuan kepada Pihak lainnya; dan
b. Sudah memperoleh ijin tertulis dari pihak lainnya.

(5) Data yang dikirimkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, maupun sebaliknya dalam pengoperasian layanan Jasa Berlangganan dan Aplikasi bersifat eksklusif untuk pemakaian internal PIHAK PERTAMA, dan PIHAK PERTAMA tidak akan menggunakan data tersebut selain daripada untuk tujuan pengendalian lalu lintas udara.

(6) Setelah Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan berakhir atau Perjanjian ini diputuskan, Para Pihak dengan ini setuju untuk mengembalikan kepada Pihak lainnya, Informasi Rahasia yang masih disimpan sebelum berakhirnya/diputuskannya Perjanjian ini.

Pasal 12
PENGAWASAN PEKERJAAN

(1) Pengawasan pelaksanaan Pekerjaan dalam Perjanjian ini dilaksanakan oleh Direksi Pekerjaan yang ditunjuk oleh serta bertindak untuk dan atas nama kepentingan PIHAK PERTAMA.

(2) Direksi Pekerjaan berwenang mengawasi pelaksanaan Pekerjaan agar sesuai dengan Syarat-Syarat Teknis Pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan maupun Dokumen Penawaran, memberikan saran/koreksi/perintah/rekomendasi/persetujuan mengenai pelaksanaan Pekerjaan sampai kepada perubahan Pekerjaan, mengkoordinasikan semua

	Pihak I	Pihak II
Paraf		

masukan-masukan teknis/operasional yang diperlukan untuk hasil Pekerjaan yang baik dan benar sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.

(3) Direksi Pekerjaan dalam melaksanakan tugasnya dapat menunjuk pengawas lapangan yang ditugaskan untuk meneliti dan mengawasi jalannya pelaksanaan Pekerjaan.

(4) Terhadap sebagian Pekerjaan yang telah diselesaikan PIHAK KEDUA, Direksi Pekerjaan mengadakan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan tersebut dan selanjutnya membuat dan menandatangani dokumen-dokumen hasil pemeriksaan yang diperlukan.

Pasal 13
KEPALA PELAKSANA

(1) Dilokasi Pekerjaan harus selalu ada wakil PIHAK KEDUA yang ditunjuk sebagai Kepala Pelaksana yang mempunyai wewenang/kuasa penuh memutuskan masalah lapangan, yang bertindak sebagai wakil PIHAK KEDUA yang dapat menerima dan menyelesaikan segala perintah serta petunjuk dari Direksi Pekerjaan.

(2) Kepala Pelaksana yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Pekerjaan harus memenuhi persyaratan dan berkewajiban sebagai berikut :
   a. menguasai bidang Pekerjaan dan telah berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) Tahun;
   b. mendapat persetujuan tertulis terkait penunjukannya dari Direksi Pekerjaan;
   c. selalu berada di Lokasi Pekerjaan selama waktu kerja dan dapat berkomunikasi setiap saat yang dianggap perlu oleh Direksi Pekerjaan;
   d. bertanggungjawab terhadap kelancaran pelaksanaan Pekerjaan.

(3) Semua tindakan Kepala Pelaksana dianggap sebagai langkah dan tindakan PIHAK KEDUA, oleh karenanya PIHAK KEDUA tidak dapat melepaskan tanggung-jawabnya sehubungan dengan tindakan Kepala Pelaksana apabila merugikan PIHAK PERTAMA atau pihak ketiga.

Pasal 14
LAPORAN DAN DOKUMENTASI PEKERJAAN

(1) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA Laporan Pekerjaan berupa :

   a. *Technical manual* termasuk *block diagram* & *wiring diagram* peralatan VSAT berikut transponder dan kelengkapannya pada setiap lokasi dan *trouble shooting manual* rangkap 3 (tiga).
   b. Laporan kemajuan (progress report) mingguan untuk pelaksanaan Pekerjaan Pekerjaan Persiapan, Pemasangan/Instalasi, Uji Coba Peralatan, *Shadow Operation* dan *Switch Over*, *Training*, *Site Acceptance Test* masing-masing dalam rangkap 3 (tiga).

	Pihak I	Pihak II
Paraf		

c. *Network monitoring report* bulanan yang menyatakan hasil pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan, Dokumentasi dan Jasa Berlangganan dan Aplikasi setiap bulannya selama Jangka Waktu Sewa.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA Dokumentasi Pekerjaan berupa foto dokumentasi berwarna, dibuat masing – masing rangkap 3 (tiga) yang menyatakan sebelum, sedang dan sesudah Pekerjaan Persiapan, Pemasangan/Instalasi, Uji Coba Peralatan, *Shadow Operation* dan *Switch Over*, *Training*, *Site Acceptance Test* dilaksanakan.

Pasal 15
PERSONEL INTI/TENAGA AHLI

(1) Dalam melaksanakan Pekerjaan PIHAK KEDUA berkewajiban mengikuti struktur organisasi proyek dan menggunakan Personel Inti dengan kualifikasi yang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA yang tertera pada Dokumen Penawaran yang menjadi satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

(2) Personel Inti atau tenaga ahli lainnya yang ditugaskan PIHAK KEDUA wajib memberikan dukungan teknis (manage service) dimulai pada saat Jangka Waktu Pemasangan sampai dengan berakhirnya Jangka Waktu Sewa/Perjanjian ini.

(3) Apabila Personel Inti atau tenaga ahli lainnya dalam struktur organisasi proyek yang ditugaskan PIHAK KEDUA menurut penilaian Direksi Pekerjaan telah melakukan kesalahan serius/mengabaikan tugas/perintah yang diberikan Direksi Pekerjaan/terlibat dalam suatu tindak pidana/pelanggaran, maka PIHAK KEDUA wajib menyediakan pengganti yang kualifikasinya setara dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya permintaan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 16
MUTU PERALATAN/FASILITAS JARINGAN

(1) Semua peralatan berikut komponennya termasuk Fasilitas Jaringan yang diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan harus bermutu baik sesuai spesifikasi teknis dan spesifikasi operasional sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan dan Dokumen Penawaran yang menjadi satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

(2) Apabila karena suatu alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak merugikan PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA akan melakukan perubahan peralatan/Fasilitas Jaringan, maka terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA dengan menyampaikan spesifikasi peralatan yang diusulkan.

	Pihak I	Pihak II
Paraf		

Pasal 17
KETERLAMBATAN DAN PERPANJANGAN WAKTU

(1) Kelalaian PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Pekerjaan yang meliputi Persiapan, Pemasangan/Instalasi, Uji Coba Peralatan, *Shadow Operation* dan *Switch Over*, *Training*, *Site Acceptance Test* atau memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan dimaksud akibat kesalahan/kelalaian PIHAK KEDUA sendiri tidak diberikan perpanjangan Jangka Waktu Pemasangan.

(2) Untuk keterlambatan bukan karena kelalaian PIHAK KEDUA, atau keterlambatan karena Keadaan Kahar (Force Majeure), PIHAK PERTAMA dapat mempertimbangkan memberikan perpanjangan Jangka Waktu Pemasangan dan terhadap keterlambatan dimaksud PIHAK KEDUA tidak akan dikenakan Denda.

(3) Pada peristiwa penghentian sebagian/keseluruhan Pekerjaan yang meliputi Persiapan, Pemasangan/Instalasi, Uji Coba Peralatan, *Shadow Operation* dan *Switch Over*, *Training*, *Site Acceptance Test* oleh PIHAK PERTAMA akibat kelalaian/kesalahan PIHAK KEDUA, tidak diberikan perpanjangan Jangka Waktu Pemasangan.

(4) Adanya perubahan Pekerjaan tidak dapat dijadikan alasan sebagai penyebab keterlambatan penyerahan Pekerjaan yang meliputi Persiapan, Pemasangan/Instalasi, Uji Coba Peralatan, *Shadow Operation* dan *Switch Over*, *Training*, *Site Acceptance Test*, tetapi PIHAK PERTAMA dapat mempertimbangkan perubahan Jangka Waktu Pemasangan untuk perubahan pekerjaan tertentu.

Pasal 18
DENDA/SANKSI DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

(1) Apabila PIHAK KEDUA terlambat menyerahkan hasil Pekerjaan yang meliputi Persiapan, Pemasangan/Instalasi, Uji Coba Peralatan, *Shadow Operation* dan *Switch Over*, *Training*, *Site Acceptance Test* dari Jangka Waktu Pemasangan disebabkan oleh kesalahan/kelalaiannya, maka PIHAK KEDUA dikenakan Denda keterlambatan sebesar 1‰ (satu perseribu) dari Biaya Pekerjaan per hari keterlambatan. Para Pihak sepakat bahwa Denda maksimum atas keterlambatan penyelesaian Pekerjaan adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari Biaya Pekerjaan.

(2) Apabila Denda keterlambatan telah mencapai jumlah Denda maksimum yaitu sebesar 5% (lima perseratus) dari Biaya Pekerjaan, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda bunga sebesar 2% (dua perseratus) perbulan dari nilai denda maksimum tersebut terhitung sejak tanggal keterlambatan sampai dengan seluruh Denda dilunasi.

(3) Apabila hasil Pekerjaan yang meliputi Persiapan, Pemasangan/Instalasi, Uji Coba Peralatan, *Shadow Operation* dan *Switch Over*, *Training*, *Site Acceptance Test* dapat diserahterimakan kepada PIHAK PERTAMA, maka Denda tersebut pada ayat (1) dan (2) Pasal ini dapat dipotong langsung oleh PIHAK PERTAMA pada waktu pembayaran Biaya Pekerjaan.

	Pihak I	Pihak II
Paraf		

(4) Apabila terjadi gangguan layanan jaringan komunikasi domestik dan Fasilitas Jaringan yang berada dalam kekuasaan PIHAK KEDUA dengan ketentuan akumulasi tingkat layanan untuk setiap hubungan aplikasi di bawah *Service Level Guarantee* yang telah disepakati bersama atau diperoleh tingkat pelayanan dalam satu bulan kurang dari 99,96% atau *down time* per hari lebih dari 35,04 detik atau *down time* akumulatif per bulan lebih dari 17,52 menit untuk setiap aplikasi, maka PIHAK KEDUA dikenakan Denda sebesar 5% dari biaya Jasa Berlangganan dan Aplikasi bulanan untuk setiap hubungan aplikasi yang mengalami gangguan dan PIHAK KEDUA berkewajiban segera memperbaiki layanan Jasa Berlangganan dan Aplikasi dalam waktu maksimum 1 x 24 jam.

(5) Apabila PIHAK KEDUA gagal menyelesaikan perbaikan gangguan hubungan aplikasi pada Jasa Berlangganan dan Aplikasi dalam waktu 1 x 24 jam, maka PIHAK KEDUA dikenakan Denda seperti pada ayat (3) Pasal ini ditambah Denda tambahan per hari keterlambatan sebesar 1/30 dari biaya Jasa Berlangganan dan Aplikasi bulanan untuk setiap hubungan aplikasi yang mengalami gangguan.

(6) Para Pihak sepakat bahwa Denda sebagaimana tersebut pada ayat (4) dan ayat (5) Pasal ini akan diperhitungkan secara proporsional pada waktu pembayaran tagihan biaya bulanan layanan Jasa Berlangganan dan Aplikasi untuk bulan berikutnya.

(7) PIHAK PERTAMA berhak mengenakan Sanksi kepada PIHAK KEDUA berupa pembatalan atau pemutusan Perjanjian secara sepihak tanpa mengesampingkan ketentuan Denda sebagaimana tersebut pada Pasal ini dan/atau larangan keikutsertaan dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan PIHAK PERTAMA selama 2 (dua) Tahun, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut :

a. Berdasarkan pengamatan/pertimbangan PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA telah lalai/cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya baik sebagian maupun seluruhnya sebagaimana disepakati dalam Perjanjian ini;
b. Denda keterlambatan penyelesaian Pekerjaan Persiapan, Pemasangan/Instalasi, Uji Coba Peralatan, *Shadow Operation* dan *Switch Over*, *Site Training*, *Site Acceptance Test* sudah melampaui besarnya nilai Jaminan Pelaksanaan/Denda maksimum pada Perjanjian ini;
c. PIHAK KEDUA nyata-nyata telah mengalihkan tanggung jawab pelaksanaan seluruh/sebagian pekerjaan utama, atau PIHAK KEDUA telah mengalihkan seluruh/sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak ketiga tanpa ijin tertulis dari PIHAK PERTAMA sebelumnya;
d. PIHAK KEDUA melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta kecurangan dalam proses pelelangan, pengadaan atau pelaksanaan Perjanjian ini.
e. PIHAK KEDUA memalsukan dokumen atau memberikan keterangan/data yang tidak benar dalam proses pelelangan, pengadaan atau pelaksanaan Perjanjian ini.
f. PIHAK KEDUA dinyatakan pailit berdasarkan keputusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap.
g. Izin Usaha PIHAK KEDUA telah dicabut oleh Pemerintah/Instansi Yang Berwenang.

	Pihak I	Pihak II
Paraf		

(8) Apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d, e, f dan g Pasal ini, PIHAK PERTAMA dapat langsung menjatuhkan Sanksi berupa pemutusan Perjanjian sepihak dan larangan keikutsertaan selama 2 (dua) Tahun dalam proses pengadaaan barang dan/atau jasa, sedangkan Penjatuhan Sanksi sebagaimana tersebut pada ayat (7) huruf a, b dan c Pasal ini oleh PIHAK PERTAMA memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

a. PIHAK PERTAMA terlebih dahulu akan memberikan peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu masing-masing peringatan adalah 10 (sepuluh) hari kalender untuk segera memperbaiki kesalahannya dan melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya sesuai isi Perjanjian ini.

b. Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kalender terhitung dari tanggal diterbitkannya surat peringatan terakhir ternyata PIHAK KEDUA tetap tidak memperbaiki kesalahannya dan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dapat membatalkan/memutuskan Perjanjian ini secara sepihak namun tidak menghilangkan kewajiban pelunasan Denda keterlambatan oleh PIHAK KEDUA,

dalam hal demikian Para Pihak sepakat secara tegas mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai pembatalan suatu perjanjian.

(9) PIHAK PERTAMA berhak melakukan pembatalan atau pemutusan Perjanjian secara sepihak kepada PIHAK KEDUA apabila terdapat Peraturan Perundang-undangan atau Keputusan Pemerintah/Instansi yang berwenang yang menyatakan bahwa Perjanjian ini tidak dapat dilanjutkan.

(10) Pemutusan Perjanjian dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan Para Pihak (Force Majeure) yang menyebabkan Para Pihak/salah satu pihak tidak dapat melanjutkan pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.

(11) Apabila dalam perencanaan Pekerjaan PIHAK KEDUA tidak cermat yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan Sanksi berupa keharusan menyusun kembali Rencana Pekerjaan dengan beban biaya ditanggung PIHAK KEDUA dan ganti kerugian yang diderita PIHAK PERTAMA.

(12) Dalam hal terjadinya pembatalan/pemutusan Perjanjian ini oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini, maka :

a. PIHAK PERTAMA dibebaskan atas kewajiban pembayaran sisa Biaya Pekerjaan;
b. Jaminan Pelaksanaan menjadi hak PIHAK PERTAMA, kecuali terhadap pemutusan Perjanjian karena Keadaan Kahar (Force Majeure);
c. PIHAK KEDUA membayar Denda keterlambatan (apabila terdapat pemutusan Perjanjian terhadap bagian Pekerjaan yang belum diselesaikan);
d. PIHAK KEDUA dapat dimasukkan dalam Daftar Hitam.

	Pihak I	Pihak II
Paraf		

Pasal 19
FORCE MAJEURE

(1) Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah suatu peristiwa/keadaan yang terjadi di luar kekuasaan Para Pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pemenuhan hak dan kewajiban oleh masing-masing pihak baik seluruh atau sebagian sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini, seperti bencana alam (gempa bumi, gunung meletus, tsunami, banjir, tanah longsor, angin topan, kekeringan), epidemi, wabah penyakit, huru hara politik, kebakaran, gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait.

(2) Tidak termasuk Force Majeure adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian masing-masing pihak.

(3) Dalam hal terjadi Force Majeure, pihak yang mengalami Force Majeure harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Force Majeure, dengan menyertakan salinan pernyataan Force Majeure dari pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kemudian dimusyawarahkan bersama guna mendapat jalan keluar yang konstruktif dan produktif bagi Para Pihak secepat dan sebaik mungkin.

(4) Apabila dalam Jangka Waktu Sewa terjadi kondisi dimana PIHAK KEDUA tidak dapat lagi melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diperjanjikan karena Force Majeure, maka PIHAK KEDUA atas perintah PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk melakukan pengalihan baik sebagian maupun seluruh pelaksanaan Pekerjaan kepada pihak ketiga yang sejenis, spesialis/profesional dan menjamin tidak akan mengganggu operasional pelayanan dan pengalihan tersebut tidak akan menimbulkan beban biaya apapun kepada PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas Pekerjaan yang dialihkan kepada pihak ketiga dan segala sesuatu yang menyangkut hubungan antara PIHAK KEDUA dengan pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas pada biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA atau PIHAK PERTAMA karena pengalihan tersebut.

(5) Semua bentuk kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya Force Majeure menjadi beban pihak yang mengalami Force Majeure tersebut.

Pasal 20
PERUBAHAN PERJANJIAN

(1) Perubahan terhadap Perjanjian harus diajukan tertulis oleh Pihak yang menginginkan perubahan kepada Pihak lainnya dengan menyebutkan jenis dan perincian yang jelas sebelum dilakukan pembicaraan mengenai usulan perubahan tersebut oleh Para Pihak.

(2) Apabila perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disepakati Para Pihak, maka Para Pihak selanjutnya menandatangani perubahan tersebut yang dituangkan dalam Berita Acara

	Pihak I	Pihak II
Paraf		

Perubahan Pekerjaan dan Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

(3) Perubahan yang merupakan Pekerjaan Tambah atau Pekerjaan Kurang hanya dapat dilakukan apabila terjadi :
   a. Keadaan Kahar (Force Majeure);
   b. terdapat kesalahan atau kelalaian PIHAK PERTAMA yang dapat dibuktikan oleh PIHAK KEDUA;
   c. terdapat perintah/rekomendasi dari Instansi Negara yang berwenang;
   d. terdapat perubahan aturan di PIHAK PERTAMA yang berhubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan; atau
   e. dikarenakan adanya kebutuhan/keinginan dari PIHAK PERTAMA.

(4) Dasar untuk perhitungan Pekerjaan Tambah dan/atau Pekerjaan Kurang dipergunakan harga satuan dari lampiran Perjanjian ini.

(5) Perhitungan Pekerjaan Tambah atau Pekerjaan Kurang dilaksanakan atas dasar harga yang disetujui oleh Para Pihak apabila tidak tercantum dalam daftar harga satuan dari lampiran Perjanjian ini.

Pasal 21
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat atas setiap dan seluruh perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Perjanjian ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan Pekerjaan ini.

(2) Apabila Para Pihak tidak dapat mencapai kata mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap dan seluruh perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini secara eksklusif melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

(3) Ketentuan Perjanjian tetap berlaku termasuk setiap hak dan kewajiban Para Pihak sampai dengan perbedaan pendapat atau perselisihan di antara Para Pihak diselesaikan, baik sebagai hasil musyawarah maupun berdasarkan atas Keputusan BANI yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

(4) Ketentuan yang terdapat di dalam Pasal ini tetap berlaku walaupun Perjanjian ini diakhiri atau masa berlakunya telah berakhir.

	Pihak I	Pihak II
Paraf		

Pasal 22
LAIN-LAIN

(1) Pajak Penghasilan (PPh) untuk seluruh biaya Pekerjaan pada Perjanjian ini menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh dan melalui PIHAK PERTAMA sebagai wajib pungut dan dipotong langsung dari pembayaran oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA akan memberikan bukti pemotongan pajak tersebut kepada PIHAK KEDUA.

(2) Perjanjian ini berlaku dan harus ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

(3) Tidak ada perubahan atau modifikasi atau penambahan pada Perjanjian ini yang sah dan mengikat Para Pihak kecuali dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani Para Pihak.

(4) Korespondensi dalam Perjanjian ini diatur sebagai berikut :

a. Penyampaian Pemberitahuan, permintaan dan usulan yang dibuat Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis (dapat didahului dengan pengiriman Fax/Email) dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai dengan tanda terima. Setiap pemberitahuan, permintaan dan surat–menyurat tersebut akan ditujukan pada alamat sebagai berikut :

Perum LPPNPI
Gedung Airnav Indonesia Lantai 2
Jalan Ir. H. Juanda
Karang Anyar, Neglasari
Tangerang 15121 – Indonesia
Telepon : (021) 55915000
Facsimile : (021) 55915100
U.p : Direktur Teknik

PT Bintang Komunikasi Utama
Graha BKU
Jalan Jengki Raya Nomor 43
Kebon Pala, Makasar,
Jakarta Timur 13650 - Indonesia
Telepon : (021) 80878128/129
Facsimile : (021) 80878130
U.p : Direktur Utama

b. Perubahan alamat salah satu Pihak harus diberitahukan kepada Pihak lainnya dan berlaku sejak diterima oleh Pihak lainnya. Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

(5) Para Pihak sepakat bahwa seluruh lampiran atas Perjanjian ini, berita acara, surat-surat dan seluruh dokumen yang dibuat dan/atau akan dibuat di kemudian hari oleh Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

(6) Dalam hal terdapat perbedaan antara Perjanjian ini dengan lampiran Perjanjian, maka yang berlaku dan dijadikan dasar pelaksanaan Pekerjaan adalah Pasal-pasal dalam Perjanjian ini.

	Pihak I	Pihak II
Paraf		

(7) Dalam hal terdapatnya satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini yang menjadi tidak berlaku karena suatu peraturan perundang-undangan maka ketidakberlakuan ketentuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya Perjanjian ini dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini masih tetap berlaku dan mengikat Para Pihak, Para Pihak selanjutnya dapat membuat dan menyetujui ketentuan yang baru untuk menggantikan ketentuan yang telah tidak berlaku tersebut, dengan suatu atau lebih ketentuan yang sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal Perjanjian, dengan terlebih dahulu telah dibaca, diteliti dengan seksama serta telah dipahami dan dimengerti Para Pihak, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani diatas meterai cukup yang memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
ROHADI	**LUKMAN F. LAISA**
Direktur Utama	Direktur Teknik

(7) Dalam hal terdapatnya satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini yang menjadi tidak berlaku karena suatu peraturan perundang-undangan maka ketidakberlakuan ketentuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya Perjanjian ini dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini masih tetap berlaku dan mengikat Para Pihak, Para Pihak selanjutnya dapat membuat dan menyetujui ketentuan yang baru untuk menggantikan ketentuan yang telah tidak berlaku tersebut, dengan suatu atau lebih ketentuan yang sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal Perjanjian, dengan terlebih dahulu telah dibaca, diteliti dengan seksama serta telah dipahami dan dimengerti Para Pihak, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani diatas meterai cukup yang memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
BKU PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA	METERAI TEMPEL F0D6DAEF125868006 6000 ENAM RIBU RUPIAH
ROHADI	**LUKMAN F. LAISA**
Direktur Utama	Direktur Teknik

LAMPIRAN
PERJANJIAN

PENGADAAN JASA BERLANGGANAN PENAMBAHAN JARINGAN KOMUNIKASI DOMESTIK DI PERUM LPPNPI

Nomor : PJJ.06.02.03/00/LPPNPI/12/2016/078

Tanggal : 28 Desember 2016

AirNav Indonesia

Perum LPPNPI
Gedung AirNav Indonesia
Jalan Ir. H. Juanda, Karanganyar, Neglasari
Tangerang 15121 - Indonesia
Telepon: 021-55915000,
Fax: 021-55915100
Website: www.airnavindonesia.co.id

ADDENDUM I

Nomor : PJJ.06.02.03/00/LPPNPI/ADD-1/02/2017/010
Tanggal : 23 Februari 2017

Atas

PERJANJIAN
PENGADAAN JASA BERLANGGANAN PENAMBAHAN JARINGAN KOMUNIKASI DOMESTIK DI PERUM LPPNPI

Nomor : **PJJ.06.02.03/00/LPPNPI/12/2016/078**
Tanggal : **28 Desember 2016**
Pelaksana : **PT Bintang Komunikasi Utama**

PERUSAHAAN UMUM
LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA

ADDENDUM I

Nomor : **PJJ.06.02.03/00/LPPNPI/ADD-1/02/2017/010**
Tanggal : **23 Februari 2017**

a t a s

PERJANJIAN
PENGADAAN JASA BERLANGGANAN PENAMBAHAN JARINGAN KOMUNIKASI DOMESTIK DI PERUM LPPNPI

Nomor : **PJJ.06.02.03/00/LPPNPI/12/2016/078**
Tanggal : **28 Desember 2016**
Pelaksana : **PT Bintang Komunikasi Utama**

Addendum Pertama atas Perjanjian Pengadaan Jasa Berlangganan Penambahan Jaringan Komunikasi Domestik Di Perum LPPNPI (selanjutnya disebut "**Addendum I**") ini dibuat dan ditandatangani pada hari kamis tanggal dua puluh tiga bulan Februari Tahun dua ribu tujuh belas (**23-02-2017**) di Tangerang, oleh dan antara :

I. **LUKMAN F. LAISA**, selaku Direktur Teknik Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-234/MBU/11/2015 Tanggal 18 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia dan Keputusan Dewan Pengawas Nomor : KEP-009/DW/XI/2015 Tanggal 01 Desember 2015 tentang Penetapan Nomenklatur Jabatan dan *Key Performance Indicators* (KPI) Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan **PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA**, berkantor pusat di Jalan Ir. H. Juanda, Karang Anyar, Neglasari, Tangerang 15121 – Indonesia, yang anggaran dasarnya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 77 Tahun 2012 Tanggal 13 September 2012;
   - Untuk selanjutnya disebut **"PIHAK PERTAMA"**.

II. **ROHADI**, selaku Direktur Utama PT Bintang Komunikasi Utama , dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **PT BINTANG KOMUNIKASI UTAMA,** beralamat di Graha BKU, Jalan Jengki Raya Nomor 43, RT 008/RW 002, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur 13650 - Indonesia, yang anggaran dasarnya tertuang dalam Akta Pendirian Nomor : 01 Tanggal 10 Desember 2001 yang dibuat dihadapan H Djoko Oetoro SH, MM, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Nomor : C-16055 HT.01.01. TH

Paraf	Pihak I	Pihak II

2003 Tanggal 11 Juli 2003 dan perubahannya yang terakhir dalam Akta Nomor : 20 Tanggal 16 September 2015 yang dibuat dihadapan Jhonni Marihotua Sianturi SH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor : AHU-AH.01.03-0965363 Tanggal 17 September 2015;

Para Pihak tetap bertindak dalam jabatannya tersebut di atas terlebih dahulu memperhatikan dan menerangkan hal-hal sebagai berikut :

A. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah Para Pihak dalam Perjanjian Nomor : PJJ.06.02.03/00/LPPNPI/12/2016/078 Tanggal 28 Desember 2016 (selanjutnya disebut "**Perjanjian Induk**"), dimana PIHAK KEDUA telah ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Jasa Berlangganan Penambahan Jaringan Komunikasi Domestik Di Perum LPPNPI;

B. Bahwa Perjanjian tersebut di atas telah dilakukan dan diterima untuk Jangka Waktu Pemasangan terhitung mulai tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017;

C. Bahwa Para Pihak telah mengadakan Rapat Pembahasan Progress Pekerjaan Jaringan VSAT pada tanggal 08 Februari 2017 sebagaimana hasil rapat tersebut dituangkan dalam Risalah Rapat, yang menyatakan terdapat perubahan terhadap beberapa koneksi pada Lingkup Pekerjaan Jasa Berlangganan Penambahan Jaringan Komunikasi Domestik dalam Perjanjian Induk;

D. Para Pihak telah saling setuju dan mufakat untuk mengadakan pekerjaan tambah kurang pada Lingkup Pekerjaan dalam Perjanjian Induk berdasarkan Berita Acara Evaluasi Perubahan Pekerjaan Nomor : BAC.027/00/02/2017-TF Tanggal 20 Februari 2017 beserta lampirannya dan Berita Acara Perubahan Pekerjaan Nomor : BAC.06.02.03/00/LPPNPI/02/2017/073 Tanggal 23 Februari 2017 beserta dokumen-dokumen lainnya yang terkait.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak telah saling setuju dan mufakat untuk melaksanakan Addendum I terhadap Perjanjian Pemborongan dengan memakai aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Para Pihak setuju dan sepakat mengadakan pekerjaan tambah kurang terhadap Lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Induk dengan mengacu pada rincian pekerjaan tambah kurang dalam dokumen-dokumen yang menjadi Lampiran Addendum I ini.

Paraf	Pihak I	Pihak II

Pasal 2

Dokumen-dokumen acuan pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) Perjanjian Induk tentang Dasar Pelaksanaan Pekerjaan ditambahkan dokumen-dokumen yang merupakan lampiran dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Addendum I ini, yaitu sebagai berikut :

a. Berita Acara Perubahan Pekerjaan Nomor : BAC.06.02.03/00/LPPNPI/02/2017/073 Tanggal 23 Februari 2017 beserta lampirannya yang memuat rincian perubahan jumlah aplikasi dan *bandwith*;
b. Berita Acara Evaluasi Perubahan Pekerjaan Nomor : BAC.027/00/02/2017-TF Tanggal 20 Februari 2017 beserta lampirannya yang memuat data-data pendukung perubahan Pekerjaan; dan
c. Risalah Rapat Pembahasan Progress Pekerjaan Jaringan VSAT pada tanggal 08 Februari 2017.

Pasal 3

Mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) tentang Biaya Pekerjaan pada Perjanjian Induk, sehingga Pasal 4 ayat (1) Perjanjian Induk untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

"(1) Biaya pelaksanaan/penyelesaian Pekerjaan pada Perjanjian ini telah disepakati oleh Para Pihak sebesar Rp 4.665.088.560,- (empat miliar enam ratus enam puluh lima juta delapan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh Rupiah) sudah termasuk PPN, semua bea dan biaya-biaya lainnya dengan rincian anggaran biaya sebagaimana dijelaskan pada lampiran Perjanjian ini."

Pasal 4

Mengubah ketentuan Pasal 5 ayat (1) tentang Tata Cara Pembayaran pada Perjanjian Induk, sehingga Pasal 5 ayat (1) Perjanjian Induk untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

"(1) Biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) Perjanjian ini akan dibayarkan secara bertahap selama Jangka Waktu Sewa jaringan komunikasi domestik oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp 388.757.380,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh Rupiah) per bulan sudah termasuk Pajak setelah Jasa Pemeliharaan Peralatan, Dokumentasi berikut Jasa Berlangganan dan Aplikasi seluruh Lokasi Pekerjaan dilaksanakan PIHAK KEDUA dengan baik dan benar dan berdasarkan realisasi pemakaian setiap jenis aplikasi link jaringan komunikasi sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Layak Operasi yang ditandatangani Para Pihak.

Paraf	Pihak I	Pihak II

Pasal 5

(1) Semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Induk yang tidak mengalami perubahan dengan dibuatnya Addendum I ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.

(2) Istilah yang diawali dengan huruf besar, yang digunakan tetapi tidak terdefinisikan pada Addendum I ini memiliki arti yang sama dengan yang ada pada Perjanjian Induk.

(3) Terhadap pelanggaran atas syarat dan ketentuan dalam Addendum I ini diberlakukan Denda dan Sanksi atau ketentuan Pasal lainnya sebagaimana disepakati Para Pihak dalam Perjanjian Induk.

(4) Bea Meterai untuk mengadakan Addendum I ini menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 6

Para Pihak sepakat bahwa Addendum I ini beserta lampirannya dan seluruh dokumen lainnya yang dibuat dan/atau akan dibuat di kemudian hari merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Induk.

Demikian Addendum I ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak di Tangerang, pada hari, tanggal, bulan, serta tahun sebagaimana tersebut dimuka, telah dibaca, diteliti dengan seksama serta telah dipahami dan dimengerti Para Pihak, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
BKU PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA	METERAI TEMPEL FAD2AAEF644469164 6000 ENAM RIBU RUPIAH
ROHADI	**LUKMAN F. LAISA**
Direktur Utama	Direktur Teknik

ADDENDUM I

Nomor : **PJJ.06.02.03/00/LPPNPI/ADD-1/02/2017/010**
Tanggal : **23 Februari 2017**

a t a s

PERJANJIAN
PENGADAAN JASA BERLANGGANAN PENAMBAHAN JARINGAN KOMUNIKASI DOMESTIK DI PERUM LPPNPI

Nomor : **PJJ.06.02.03/00/LPPNPI/12/2016/078**
Tanggal : **28 Desember 2016**
Pelaksana : **PT Bintang Komunikasi Utama**

Kantor Pusat Perum LPPNPI
Gedung Airnav Indonesia
Jl. Ir. H. Juanda
Tangerang 15121
Banten – Indonesia
Telp. 021-55915000
021-22250111 (Hunting)
Fax: 021- 55915100
www.airnavindonesia.co.id

AirNav Indonesia

BERITA ACARA PERUBAHAN PEKERJAAN JARINGAN KOMUNIKASI DOMESTIK DI PERUM LPPNPI	NOMOR : BAC.06.02.03/00/LPPNPI/02/2017/073 TANGGAL : 23 FEBRUARI 2017
FASILITAS KOMUNIKASI	RAB TAHUN : ESKPLOITASI TAHUN 2016 M.A NOMOR :

Pada hari ini, ***Kamis*** tanggal ***Dua Puluh Tiga*** bulan ***Februari*** tahun ***Dua Ribu Tujuh Belas***, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : LUKMAN F. LAISA
Jabatan : Direktur Teknik Perum LPPNPI

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : ROHADI
Jabatan : Direktur Utama PT. Bintang Komunikasi Utama
Alamat : Graha BKU, Jalan Jengki Raya Nomor 43, RT008/RW 002, Kelurahan Kebon Pala, Kecamaytan Makassar, Jakarta Timur 13650 – Indonesia

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini Para Pihak sepakat untuk mengadakan perubahan lingkup pekerjaan dari Perjanjian Nomor : PJJ.06.02.03/00/LPPNPI/12/2016/078 tanggal 28 Desember 2016 untuk pekerjaan :

PENGADAAN JASA BERLANGGANAN PENAMBAHAN JARINGAN KOMUNIKASI DOMESTIK DI PERUM LPPNPI

Perubahan lingkup pekerjaan didasarkan dan ditentukan sebagai berikut :

1. Surat perjanjian Nomor : PJJ.06.02.03/00/LPPNPI/12/2016/078 tanggal 28 Desember 2016 pasal 20 Perubahan Perjanjian ayat (3) Perubahan yang merupakan Pekerjaan Tambah Atau Pekerjaan Kurang hanya dapat dilakukan apabila terjadi : poin (e) dikarenakan adanya kebutuhan/keinginan dari Pihak Pertama;
2. Berita Acara Evaluasi Pekerjaan Nomor BAC.027/00/02/2017/-TF tanggal 20 Februari 2017 perihal Pengadaan Jasa Berlangganan Penambahan Jaringan Komunikasi Domestik Di Perum LPPNPI.

Dengan Adanya ...../2

Dengan adanya perubahan pekerjaan ini, maka nilai kontrak pada Surat Perjanjian Nomor : PJJ.06.02.03/00/LPPNPI/12/2016/078 tanggal 28 Desember 2016 yang semula Rp 5.030.000.000,- per Tahun berubah menjadi Rp 4.665.088.560,- per Tahun. Biaya Pekerjaan yang akan dibayarkan secara bertahap selama masa sewa jaringan dalam Perjanjian yang semula sebesar Rp 419.166.666,- per Bulan berubah menjadi maksimum Rp 388.757.380,- per Bulan.

Demikian Berita Acara Perubahan Pekerjaan ini dibuat dan dibubuhi dengan sebenarnya sebagai pelengkap yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Nomor: PJJ.06.02.03/00/LPPNPI/12/2016/078 tanggal 28 Desember 2016 untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA	PIHAK PERTAMA PERUM LPPNPI
BKU PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA	METERAI TEMPEL 6000 ENAM RIBU RUPIAH
ROHADI Direktur Utama	LUKMAN F. LAISA Direktur Teknik

BERITA ACARA EVALUASI PERUBAHAN PEKERJAAN	
Pekerjaan : Pengadaan Jasa Berlangganan Penambahan Jaringan Komunikasi Domestik Di Perum LPPNPI	Nomor : BAC/00/02/2017-TF
Lokasi : Perum LPPNPI Kantor Pusat	Tanggal : 20 Februari 2017

Pada hari ini, ***Senin*** tanggal ***Dua Puluh*** bulan ***Februari*** tahun ***Dua Ribu Tujuh Belas***, yang bertindak sebagai Manager Unit ST Perum LPPNPI, memandang perlu untuk mengadakan perubahan lingkup pekerjaan dari Perjanjian Nomor : PJJ.06.02.03/00/LPPNPI/12/2016/078 tanggal 28 Desember 2016 untuk pekerjaan : Pengadaan Jasa Berlangganan Penambahan Jaringan Komunikasi Domestik Di Perum LPPNPI yang dilaksanakan oleh PT. Bintang Komunikasi Utama.

Perubahan lingkup pekerjaan yang ditentukan adalah menghapus, mengubah dan menambah koneksi dalam Dokumen Penawaran PIHAK KEDUA karena adanya optimalisasi penggunaan jaringan dan permintaan koneksi jaringan baru guna mendukung operasi pelayanan pengendalian lalu lintas udara dan navigasi penerbangan tanpa perubahan harga satuan *bandwith*, *manage service*, biaya *station* dan biaya *dismantle* yang menjadi komponen harga sewa berlangganan jaringan domestik.

Perubahan lingkup pekerjaan dimaksud adalah mengurangi jumlah aplikasi yang semula berjumlah 79 aplikasi menjadi 74 aplikasi, mengurangi jumlah koneksi yang semula berjumlah 53 koneksi menjadi 48 koneksi, namun menambah jumlah bandwidth yang semula 1744 kbps menjadi 1756.8 kbps, sehingga Biaya Pekerjaan dalam Perjanjian Induk yang semula Rp 5.030.000.000,- per Tahun berubah menjadi Rp 4.665.088.560,- per Tahun. Biaya Pekerjaan yang akan dibayarkan secara bertahap selama masa sewa jaringan dalam Perjanjian Induk yang semula sebesar Rp 419.166.666,- per Bulan berubah menjadi maksimum Rp 388.757.380,- per Bulan.

Rincian pekerjaan setelah adanya pekerjaan tambah / kurang sebagaimana dalam lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Evaluasi Perubahan Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai pelengkap yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Perubahan Pekerjaan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui,	Dibuat Oleh,
KEPALA DIVISI TEKNIK KESIAPAN FASILITAS	**MANAGER TEKNIK KESIAPAN FASILITAS KOMUNIKASI**
MADE GEDE NUGRAHA D.	**MUKHTAR**

RENCANA ANGGARAN BIAYA

PENGADAAN JASA BERLANGGANAN PENAMBAHAN JARINGAN KOMUNIKASI DOMESTIK DI PERUM LPPNPI

(ADDENDUM I)

NO	KONEKSI		JUMLAH APLIKASI & BANDWIDTH (KBPS)														TOTAL BANDWIDTH	HARGA BANDWIDTH	MANAGE SERVICE	BIAYA STATION	BIAYA DISMANTLE	TOTAL PER BULAN
	DARI	KE	QTY	DS	QTY	TTY	QTY	RD	QTY	ER	QTY	RC	QTY	ADSB	QTY	ATN						
1	ATAMBUA	KUPANG							1	9.6							9.6	Rp 453,600	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 6,103,600
2	SORONG	MATSC							1	9.6							9.6	Rp 453,600	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 6,103,600
3	SORONG	KAIMANA	1	9.6	1	2.4											12	Rp 567,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 6,217,000
4	MERAUKE (HF)	MATSC (HF)							1	128							128	Rp 6,048,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 11,698,000
5	BANJARMASIN (HF)	MATSC (HF)							1	128							128	Rp 6,048,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 11,698,000
6	MANADO (HF)	MATSC (HF)							1	128							128	Rp 6,048,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 11,698,000
7	MERAUKE (HF)	SENTANI (HF)							1	128							128	Rp 6,048,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 11,698,000
8	SEMARANG	CIREBON							1	9.6							9.6	Rp 453,600	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 6,103,600
9	JANGLI (Semarang)	JOGJA											1	64			64	Rp 3,024,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 8,674,000
10	KUPANG	DENPASAR											1	64			64	Rp 3,024,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 8,674,000
11	PONTIANAK	MATSC					1	19.2									19.2	Rp 907,200	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 6,557,200
12	SENTANI	MATSC											1	64			64	Rp 3,024,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 8,674,000
13	MAKASSAR (MATSC)	ATAMBUA							1	9.6							9.6	Rp 453,600	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 6,103,600
14	SURABAYA	JATSC					1	19.2									19.2	Rp 907,200	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 6,557,200
15	BANJARMASIN	JATSC					1	19.2									19.2	Rp 907,200	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 6,557,200
16	TIMIKA	SENTANI							1	9.6			1	64			73.6	Rp 3,477,600	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 9,127,600
17	ELILIM	SENTANI											1	64			64	Rp 3,024,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 8,674,000
18	WAMENA	SENTANI											1	64			64	Rp 3,024,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 8,674,000
19	DEKAI	SENTANI											1	64			64	Rp 3,024,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 8,674,000
20	OKSIBIL	SENTANI											1	64			64	Rp 3,024,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 8,674,000
21	BORME	SENTANI											1	64			64	Rp 3,024,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 8,674,000
22	SENGGEH	SENTANI											1	64			64	Rp 3,024,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 8,674,000
23	MEDAN	SIBOLGA	1	9.6	1	2.4			1	9.6							21.6	Rp 1,020,600	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 6,670,600
24	MEDAN	GN. SITOLI	1	9.6	1	2.4											12	Rp 567,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 6,217,000
25	MEDAN	AEK GODANG	1	9.6	1	2.4											12	Rp 567,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 6,217,000
26	MEDAN	SILANGIT	1	9.6	1	2.4											12	Rp 567,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 6,217,000
27	PADANG	ROKOT	1	9.6	1	2.4											12	Rp 567,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 6,217,000
28	BATAM	MATAK	1	9.6	1	2.4											12	Rp 567,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 6,217,000
29	BATAM	NATUNA	1	9.6	1	2.4											12	Rp 567,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 6,217,000
30	BATAM	DABO	1	9.6	1	2.4											12	Rp 567,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 6,217,000
31	AMBON	SAUMLAKI	1	9.6	1	2.4											12	Rp 567,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 6,217,000
32	AMBON	LANGGUR	1	9.6	1	2.4											12	Rp 567,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 6,217,000
33	KUPANG	SABU	1	9.6	1	2.4											12	Rp 567,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 6,217,000
34	KUPANG	BAJAWA	1	9.6	1	2.4											12	Rp 567,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 6,217,000
35	KUPANG	ENDE	1	9.6	1	2.4											12	Rp 567,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 6,217,000
36	KUPANG	LABUHAN BAJO	1	9.6	1	2.4											12	Rp 567,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 6,217,000
37	KUPANG	MAUMERE	1	9.6	1	2.4											12	Rp 567,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 6,217,000
38	KUPANG	ALOR	1	9.6	1	2.4											12	Rp 567,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 6,217,000
39	KUPANG	TAMBOLAKA	1	9.6	1	2.4											12	Rp 567,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 6,217,000
40	KUPANG	WAINGAPU	1	9.6	1	2.4											12	Rp 567,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 6,217,000
41	TERNATE	BULI	1	9.6	1	2.4											12	Rp 567,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 6,217,000
42	TERNATE	GALELA	1	9.6	1	2.4											12	Rp 567,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 6,217,000
43	TERNATE	LABUHA	1	9.6	1	2.4											12	Rp 567,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 6,217,000
44	TERNATE	KAO	1	9.6	1	2.4											12	Rp 567,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 6,217,000
45	PALU	LUWUK	1	9.6	1	2.4											12	Rp 567,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 6,217,000
46	SURABAYA	JANGLI (SEMARANG)							1	9.6							9.6	Rp 453,600	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 6,103,600

NO	KONEKSI		JUMLAH APLIKASI & BANDWIDTH (KBPS)														TOTAL BANDWIDTH	HARGA BANDWIDTH	MANAGE SERVICE	BIAYA STATION	BIAYA DISMANTLE	TOTAL PER BULAN
	DARI	KE	QTY	DS	QTY	TTY	QTY	RO	QTY	ER	QTY	RC	QTY	ADSB	QTY	ATN						
47	CILACAP	YOGYAKARTA											1	64			64	Rp 3,024,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 8,674,000
48	JATSC (HF)	MATSC (HF)							1	128							128	Rp 6,048,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 11,698,000

JUMLAH =	Rp	354,208,800
Penyesuaian Negosiasi =	Rp	793,000
Jumlah Hasil Setelah Negosiasi =	Rp	353,415,800
PPN 10% =	Rp	35,341,580
TOTAL SETELAH NEGOSIASI =	Rp	388,757,380

Terbilang : *tiga ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah*

NILAI KONTRAK SELAMA 1 (SATU) TAHUN

TOTAL = Rp 4,665,088,560

Terbilang : *empat milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah*

Jakarta, 20 Februari 2017
PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA

BKU
PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA

ROHADI
Direktur Utama

RINCIAN PERUBAHAN LINK PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA

NO	KONEKSI		JUMLAH APLIKASI & BANDWIDTH (KBPS)														TOTAL	KETERANGAN
	DARI	KE	QTY	DS	QTY	TTY	QTY	RD	QTY	ER	QTY	RC	QTY	ADSB	QTY	ATN	BANDWIDTH	
1	ATAMBUA	KUPANG							1	9,6							9,6	
2	SORONG	MATSC							1	9,6							9,6	
3	SORONG	KAIMANA	1	9,6	1	2,4											12	
4	ATAMBUA	MATSC							1	9,6							9,6	
5	SURABAYA	JANGLI							1	9,6							9,6	
6	MERAUKE (HF)	MATSC (HF)							1	128							128	
7	BANJARMASIN (HF)	MATSC (HF)							1	128							128	
8	MANADO (HF)	MATSC (HF)							1	128							128	
9	MERAUKE (HF)	SENTANI (HF)							1	128							128	
10	SEMARANG	CIREBON							1	9,6							9,6	
11	JANGLI (Semarang)	JOGJA											1	64			64	
12	KUPANG	DENPASAR											1	64			64	
13	JATSC	MATSC							1	128							128	DITAMBAHKAN
14	KUPANG	DENPASAR																DIHILANGKAN
15	TARAKAN	MATSC																DIHILANGKAN
16	TIMIKA	MATSC																DIHILANGKAN
17	PONTIANAK	MATSC					1	19,2									19,2	
18	SENTANI	MATSC											1	64			64	
19	MEDAN	SIBOLGA							1	9,6							9,6	
20	WAINGAPU	DENPASAR											1	64			64	DIPINDAHKAN CILACAP - YOGYAKARTA
21	PANGKALANBUN	JATSC																DIHILANGKAN
22	SURABAYA	JATSC					1	19,2									19,2	
23	BANJARMASIN	JATSC					1	19,2									19,2	
24	BANJARMASIN	BALIK PAPAN																DIHILANGKAN
25	TARAKAN	BALIK PAPAN																DIHILANGKAN
26	TIMIKA	SENTANI							1	9,6			1	64			73,6	
27	ELIJIM	SENTANI											1	64			64	
28	WAMENA	SENTANI											1	64			64	
29	DEKAI	SENTANI											1	64			64	
30	OKSIBIL	SENTANI											1	64			64	
31	BORME	SENTANI											1	64			64	
32	SENGGEH	SENTANI											1	64			64	
33	MEDAN	SIBOLGA	1	9,6	1	2,4											12	
34	MEDAN	GN. SITOLI	1	9,6	1	2,4											12	
35	MEDAN	AEK GODANG	1	9,6	1	2,4											12	
36	MEDAN	SILANGIT	1	9,6	1	2,4											12	
37	PADANG	ROKOT	1	9,6	1	2,4											12	
38	BATAM	MATAK	1	9,6	1	2,4											12	
39	BATAM	NATUNA	1	9,6	1	2,4											12	
40	BATAM	DABO	1	9,6	1	2,4											12	
41	AMBON	SAUMLAKI	1	9,6	1	2,4											12	
42	AMBON	LANGGUR	1	9,6	1	2,4											12	
43	KUPANG	SABU	1	9,6	1	2,4											12	
44	KUPANG	BAJAWA	1	9,6	1	2,4											12	
45	KUPANG	ENDE	1	9,6	1	2,4											12	
46	KUPANG	LABUHAN BAJO	1	9,6	1	2,4											12	
47	KUPANG	MAUMERE	1	9,6	1	2,4											12	
48	KUPANG	ALOR	1	9,6	1	2,4											12	
49	KUPANG	TAMBOLAKA	1	9,6	1	2,4											12	
50	KUPANG	WANGIAPU	1	9,6	1	2,4											12	
51	TERNATE	BULI	1	9,6	1	2,4											12	
52	TERNATE	GALELA	1	9,6	1	2,4											12	
53	TERNATE	LABUHA	1	9,6	1	2,4											12	
54	TERNATE	KAO	1	9,6	1	2,4											12	
55	PALU	LUWUK	1	9,6	1	2,4											12	

AirNav Indonesia

Perum LPPNPI
Gedung AirNav Indonesia
Jalan Ir. H. Juanda, Karanganyar, Neglasari
Tangerang 15121 - Indonesia
Telepon: 021-55915000,
Fax: 021-55915100
Website: www.airnavindonesia.co.id

ADDENDUM I

Nomor : PJJ.06.02.03/00/LPPNPI/ADD-1/02/2017/010
Tanggal : 23 Februari 2017

Atas

PERJANJIAN
PENGADAAN JASA BERLANGGANAN PENAMBAHAN JARINGAN KOMUNIKASI DOMESTIK DI PERUM LPPNPI

Nomor : **PJJ.06.02.03/00/LPPNPI/12/2016/078**
Tanggal : **28 Desember 2016**
Pelaksana : **PT Bintang Komunikasi Utama**

PERUSAHAAN UMUM
LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA

ADDENDUM I

Nomor : **PJJ.06.02.03/00/LPPNPI/ADD-1/02/2017/010**
Tanggal : **23 Februari 2017**

a t a s

PERJANJIAN
PENGADAAN JASA BERLANGGANAN PENAMBAHAN JARINGAN KOMUNIKASI DOMESTIK DI PERUM LPPNPI

Nomor : **PJJ.06.02.03/00/LPPNPI/12/2016/078**
Tanggal : **28 Desember 2016**
Pelaksana : **PT Bintang Komunikasi Utama**

Addendum Pertama atas Perjanjian Pengadaan Jasa Berlangganan Penambahan Jaringan Komunikasi Domestik Di Perum LPPNPI (selanjutnya disebut "**Addendum I**") ini dibuat dan ditandatangani pada hari kamis tanggal dua puluh tiga bulan Februari Tahun dua ribu tujuh belas (**23-02-2017**) di Tangerang, oleh dan antara :

I. **LUKMAN F. LAISA**, selaku Direktur Teknik Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-234/MBU/11/2015 Tanggal 18 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia dan Keputusan Dewan Pengawas Nomor : KEP-009/DW/XI/2015 Tanggal 01 Desember 2015 tentang Penetapan Nomenklatur Jabatan dan *Key Performance Indicators* (KPI) Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan **PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA**, berkantor pusat di Jalan Ir. H. Juanda, Karang Anyar, Neglasari, Tangerang 15121 – Indonesia, yang anggaran dasarnya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 77 Tahun 2012 Tanggal 13 September 2012;
   - Untuk selanjutnya disebut **"PIHAK PERTAMA"**.

II. **ROHADI**, selaku Direktur Utama PT Bintang Komunikasi Utama , dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **PT BINTANG KOMUNIKASI UTAMA,** beralamat di Graha BKU, Jalan Jengki Raya Nomor 43, RT 008/RW 002, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur 13650 - Indonesia, yang anggaran dasarnya tertuang dalam Akta Pendirian Nomor : 01 Tanggal 10 Desember 2001 yang dibuat dihadapan H Djoko Oetoro SH, MM, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Nomor : C-16055 HT.01.01. TH

Paraf	Pihak I	Pihak II

2003 Tanggal 11 Juli 2003 dan perubahannya yang terakhir dalam Akta Nomor : 20 Tanggal 16 September 2015 yang dibuat dihadapan Jhonni Marihotua Sianturi SH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor : AHU-AH.01.03-0965363 Tanggal 17 September 2015;

Para Pihak tetap bertindak dalam jabatannya tersebut di atas terlebih dahulu memperhatikan dan menerangkan hal-hal sebagai berikut :

A. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah Para Pihak dalam Perjanjian Nomor : PJJ.06.02.03/00/LPPNPI/12/2016/078 Tanggal 28 Desember 2016 (selanjutnya disebut "**Perjanjian Induk**"), dimana PIHAK KEDUA telah ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Jasa Berlangganan Penambahan Jaringan Komunikasi Domestik Di Perum LPPNPI;

B. Bahwa Perjanjian tersebut di atas telah dilakukan dan diterima untuk Jangka Waktu Pemasangan terhitung mulai tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017;

C. Bahwa Para Pihak telah mengadakan Rapat Pembahasan Progress Pekerjaan Jaringan VSAT pada tanggal 08 Februari 2017 sebagaimana hasil rapat tersebut dituangkan dalam Risalah Rapat, yang menyatakan terdapat perubahan terhadap beberapa koneksi pada Lingkup Pekerjaan Jasa Berlangganan Penambahan Jaringan Komunikasi Domestik dalam Perjanjian Induk;

D. Para Pihak telah saling setuju dan mufakat untuk mengadakan pekerjaan tambah kurang pada Lingkup Pekerjaan dalam Perjanjian Induk berdasarkan Berita Acara Evaluasi Perubahan Pekerjaan Nomor : BAC.027/00/02/2017-TF Tanggal 20 Februari 2017 beserta lampirannya dan Berita Acara Perubahan Pekerjaan Nomor : BAC.06.02.03/00/LPPNPI/02/2017/073 Tanggal 23 Februari 2017 beserta dokumen-dokumen lainnya yang terkait.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak telah saling setuju dan mufakat untuk melaksanakan Addendum I terhadap Perjanjian Pemborongan dengan memakai aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Para Pihak setuju dan sepakat mengadakan pekerjaan tambah kurang terhadap Lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Induk dengan mengacu pada rincian pekerjaan tambah kurang dalam dokumen-dokumen yang menjadi Lampiran Addendum I ini.

Paraf	Pihak I	Pihak II

Pasal 2

Dokumen-dokumen acuan pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) Perjanjian Induk tentang Dasar Pelaksanaan Pekerjaan ditambahkan dokumen-dokumen yang merupakan lampiran dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Addendum I ini, yaitu sebagai berikut :

a. Berita Acara Perubahan Pekerjaan Nomor : BAC.06.02.03/00/LPPNPI/02/2017/073 Tanggal 23 Februari 2017 beserta lampirannya yang memuat rincian perubahan jumlah aplikasi dan *bandwith*;
b. Berita Acara Evaluasi Perubahan Pekerjaan Nomor : BAC.027/00/02/2017-TF Tanggal 20 Februari 2017 beserta lampirannya yang memuat data-data pendukung perubahan Pekerjaan; dan
c. Risalah Rapat Pembahasan Progress Pekerjaan Jaringan VSAT pada tanggal 08 Februari 2017.

Pasal 3

Mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) tentang Biaya Pekerjaan pada Perjanjian Induk, sehingga Pasal 4 ayat (1) Perjanjian Induk untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

"(1) Biaya pelaksanaan/penyelesaian Pekerjaan pada Perjanjian ini telah disepakati oleh Para Pihak sebesar Rp 4.665.088.560,- (empat miliar enam ratus enam puluh lima juta delapan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh Rupiah) sudah termasuk PPN, semua bea dan biaya-biaya lainnya dengan rincian anggaran biaya sebagaimana dijelaskan pada lampiran Perjanjian ini."

Pasal 4

Mengubah ketentuan Pasal 5 ayat (1) tentang Tata Cara Pembayaran pada Perjanjian Induk, sehingga Pasal 5 ayat (1) Perjanjian Induk untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

"(1) Biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) Perjanjian ini akan dibayarkan secara bertahap selama Jangka Waktu Sewa jaringan komunikasi domestik oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp 388.757.380,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh Rupiah) per bulan sudah termasuk Pajak setelah Jasa Pemeliharaan Peralatan, Dokumentasi berikut Jasa Berlangganan dan Aplikasi seluruh Lokasi Pekerjaan dilaksanakan PIHAK KEDUA dengan baik dan benar dan berdasarkan realisasi pemakaian setiap jenis aplikasi link jaringan komunikasi sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Layak Operasi yang ditandatangani Para Pihak.

Paraf	Pihak I	Pihak II

Pasal 5

(1) Semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Induk yang tidak mengalami perubahan dengan dibuatnya Addendum I ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.

(2) Istilah yang diawali dengan huruf besar, yang digunakan tetapi tidak terdefinisikan pada Addendum I ini memiliki arti yang sama dengan yang ada pada Perjanjian Induk.

(3) Terhadap pelanggaran atas syarat dan ketentuan dalam Addendum I ini diberlakukan Denda dan Sanksi atau ketentuan Pasal lainnya sebagaimana disepakati Para Pihak dalam Perjanjian Induk.

(4) Bea Meterai untuk mengadakan Addendum I ini menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 6

Para Pihak sepakat bahwa Addendum I ini beserta lampirannya dan seluruh dokumen lainnya yang dibuat dan/atau akan dibuat di kemudian hari merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Induk.

Demikian Addendum I ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak di Tangerang, pada hari, tanggal, bulan, serta tahun sebagaimana tersebut dimuka, telah dibaca, diteliti dengan seksama serta telah dipahami dan dimengerti Para Pihak, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
BKU PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA	METERAI TEMPEL FAD2AAEF644469164 6000 ENAM RIBU RUPIAH
ROHADI	**LUKMAN F. LAISA**
Direktur Utama	Direktur Teknik

ADDENDUM I

Nomor : **PJJ.06.02.03/00/LPPNPI/ADD-1/02/2017/010**
Tanggal : **23 Februari 2017**

a t a s

PERJANJIAN
PENGADAAN JASA BERLANGGANAN PENAMBAHAN JARINGAN KOMUNIKASI DOMESTIK DI PERUM LPPNPI

Nomor : **PJJ.06.02.03/00/LPPNPI/12/2016/078**
Tanggal : **28 Desember 2016**
Pelaksana : **PT Bintang Komunikasi Utama**

Kantor Pusat Perum LPPNPI
Gedung Airnav Indonesia
Jl. Ir. H. Juanda
Tangerang 15121
Banten – Indonesia
Telp. 021-55915000
021-22250111 (Hunting)
Fax: 021- 55915100
www.airnavindonesia.co.id

AirNav Indonesia

BERITA ACARA PERUBAHAN PEKERJAAN JARINGAN KOMUNIKASI DOMESTIK DI PERUM LPPNPI	NOMOR : BAC.06.02.03/00/LPPNPI/02/2017/073 TANGGAL : 23 FEBRUARI 2017
FASILITAS KOMUNIKASI	RAB TAHUN : ESKPLOITASI TAHUN 2016 M.A NOMOR :

Pada hari ini, ***Kamis*** tanggal ***Dua Puluh Tiga*** bulan ***Februari*** tahun ***Dua Ribu Tujuh Belas***, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : LUKMAN F. LAISA
Jabatan : Direktur Teknik Perum LPPNPI

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : ROHADI
Jabatan : Direktur Utama PT. Bintang Komunikasi Utama
Alamat : Graha BKU, Jalan Jengki Raya Nomor 43, RT008/RW 002, Kelurahan Kebon Pala, Kecamaytan Makassar, Jakarta Timur 13650 – Indonesia

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini Para Pihak sepakat untuk mengadakan perubahan lingkup pekerjaan dari Perjanjian Nomor : PJJ.06.02.03/00/LPPNPI/12/2016/078 tanggal 28 Desember 2016 untuk pekerjaan :

PENGADAAN JASA BERLANGGANAN PENAMBAHAN JARINGAN KOMUNIKASI DOMESTIK DI PERUM LPPNPI

Perubahan lingkup pekerjaan didasarkan dan ditentukan sebagai berikut :

1. Surat perjanjian Nomor : PJJ.06.02.03/00/LPPNPI/12/2016/078 tanggal 28 Desember 2016 pasal 20 Perubahan Perjanjian ayat (3) Perubahan yang merupakan Pekerjaan Tambah Atau Pekerjaan Kurang hanya dapat dilakukan apabila terjadi : poin (e) dikarenakan adanya kebutuhan/keinginan dari Pihak Pertama;
2. Berita Acara Evaluasi Pekerjaan Nomor BAC.027/00/02/2017/-TF tanggal 20 Februari 2017 perihal Pengadaan Jasa Berlangganan Penambahan Jaringan Komunikasi Domestik Di Perum LPPNPI.

Dengan Adanya ...../2

Dengan adanya perubahan pekerjaan ini, maka nilai kontrak pada Surat Perjanjian Nomor : PJJ.06.02.03/00/LPPNPI/12/2016/078 tanggal 28 Desember 2016 yang semula Rp 5.030.000.000,- per Tahun berubah menjadi Rp 4.665.088.560,- per Tahun. Biaya Pekerjaan yang akan dibayarkan secara bertahap selama masa sewa jaringan dalam Perjanjian yang semula sebesar Rp 419.166.666,- per Bulan berubah menjadi maksimum Rp 388.757.380,- per Bulan.

Demikian Berita Acara Perubahan Pekerjaan ini dibuat dan dibubuhi dengan sebenarnya sebagai pelengkap yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Nomor: PJJ.06.02.03/00/LPPNPI/12/2016/078 tanggal 28 Desember 2016 untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA	PIHAK PERTAMA PERUM LPPNPI
BKU PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA	METERAI TEMPEL 6000 ENAM RIBU RUPIAH
ROHADI Direktur Utama	LUKMAN F. LAISA Direktur Teknik

BERITA ACARA EVALUASI PERUBAHAN PEKERJAAN	
Pekerjaan : Pengadaan Jasa Berlangganan Penambahan Jaringan Komunikasi Domestik Di Perum LPPNPI	Nomor : BAC/00/02/2017-TF
Lokasi : Perum LPPNPI Kantor Pusat	Tanggal : 20 Februari 2017

Pada hari ini, ***Senin*** tanggal ***Dua Puluh*** bulan ***Februari*** tahun ***Dua Ribu Tujuh Belas***, yang bertindak sebagai Manager Unit ST Perum LPPNPI, memandang perlu untuk mengadakan perubahan lingkup pekerjaan dari Perjanjian Nomor : PJJ.06.02.03/00/LPPNPI/12/2016/078 tanggal 28 Desember 2016 untuk pekerjaan : Pengadaan Jasa Berlangganan Penambahan Jaringan Komunikasi Domestik Di Perum LPPNPI yang dilaksanakan oleh PT. Bintang Komunikasi Utama.

Perubahan lingkup pekerjaan yang ditentukan adalah menghapus, mengubah dan menambah koneksi dalam Dokumen Penawaran PIHAK KEDUA karena adanya optimalisasi penggunaan jaringan dan permintaan koneksi jaringan baru guna mendukung operasi pelayanan pengendalian lalu lintas udara dan navigasi penerbangan tanpa perubahan harga satuan *bandwith*, *manage service*, biaya *station* dan biaya *dismantle* yang menjadi komponen harga sewa berlangganan jaringan domestik.

Perubahan lingkup pekerjaan dimaksud adalah mengurangi jumlah aplikasi yang semula berjumlah 79 aplikasi menjadi 74 aplikasi, mengurangi jumlah koneksi yang semula berjumlah 53 koneksi menjadi 48 koneksi, namun menambah jumlah bandwidth yang semula 1744 kbps menjadi 1756.8 kbps, sehingga Biaya Pekerjaan dalam Perjanjian Induk yang semula Rp 5.030.000.000,- per Tahun berubah menjadi Rp 4.665.088.560,- per Tahun. Biaya Pekerjaan yang akan dibayarkan secara bertahap selama masa sewa jaringan dalam Perjanjian Induk yang semula sebesar Rp 419.166.666,- per Bulan berubah menjadi maksimum Rp 388.757.380,- per Bulan.

Rincian pekerjaan setelah adanya pekerjaan tambah / kurang sebagaimana dalam lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Evaluasi Perubahan Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai pelengkap yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Perubahan Pekerjaan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui,	Dibuat Oleh,
KEPALA DIVISI TEKNIK KESIAPAN FASILITAS	**MANAGER TEKNIK KESIAPAN FASILITAS KOMUNIKASI**
MADE GEDE NUGRAHA D.	**MUKHTAR**

RENCANA ANGGARAN BIAYA

PENGADAAN JASA BERLANGGANAN PENAMBAHAN JARINGAN KOMUNIKASI DOMESTIK DI PERUM LPPNPI

(ADDENDUM I)

NO	KONEKSI		JUMLAH APLIKASI & BANDWIDTH (KBPS)														TOTAL BANDWIDTH	HARGA BANDWIDTH	MANAGE SERVICE	BIAYA STATION	BIAYA DISMANTLE	TOTAL PER BULAN
	DARI	KE	QTY	DS	QTY	TTY	QTY	RD	QTY	ER	QTY	RC	QTY	ADSB	QTY	ATN						
1	ATAMBUA	KUPANG							1	9.6							9.6	Rp 453,600	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 6,103,600
2	SORONG	MATSC							1	9.6							9.6	Rp 453,600	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 6,103,600
3	SORONG	KAIMANA	1	9.6	1	2.4											12	Rp 567,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 6,217,000
4	MERAUKE (HF)	MATSC (HF)							1	128							128	Rp 6,048,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 11,698,000
5	BANJARMASIN (HF)	MATSC (HF)							1	128							128	Rp 6,048,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 11,698,000
6	MANADO (HF)	MATSC (HF)							1	128							128	Rp 6,048,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 11,698,000
7	MERAUKE (HF)	SENTANI (HF)							1	128							128	Rp 6,048,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 11,698,000
8	SEMARANG	CIREBON							1	9.6							9.6	Rp 453,600	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 6,103,600
9	JANGLI (Semarang)	JOGJA											1	64			64	Rp 3,024,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 8,674,000
10	KUPANG	DENPASAR											1	64			64	Rp 3,024,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 8,674,000
11	PONTIANAK	MATSC					1	19.2									19.2	Rp 907,200	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 6,557,200
12	SENTANI	MATSC											1	64			64	Rp 3,024,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 8,674,000
13	MAKASSAR (MATSC)	ATAMBUA							1	9.6							9.6	Rp 453,600	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 6,103,600
14	SURABAYA	JATSC					1	19.2									19.2	Rp 907,200	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 6,557,200
15	BANJARMASIN	JATSC					1	19.2									19.2	Rp 907,200	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 6,557,200
16	TIMIKA	SENTANI							1	9.6			1	64			73.6	Rp 3,477,600	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 9,127,600
17	ELILIM	SENTANI											1	64			64	Rp 3,024,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 8,674,000
18	WAMENA	SENTANI											1	64			64	Rp 3,024,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 8,674,000
19	DEKAI	SENTANI											1	64			64	Rp 3,024,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 8,674,000
20	OKSIBIL	SENTANI											1	64			64	Rp 3,024,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 8,674,000
21	BORME	SENTANI											1	64			64	Rp 3,024,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 8,674,000
22	SENGGEH	SENTANI											1	64			64	Rp 3,024,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 8,674,000
23	MEDAN	SIBOLGA	1	9.6	1	2.4			1	9.6							21.6	Rp 1,020,600	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 6,670,600
24	MEDAN	GN. SITOLI	1	9.6	1	2.4											12	Rp 567,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 6,217,000
25	MEDAN	AEK GODANG	1	9.6	1	2.4											12	Rp 567,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 6,217,000
26	MEDAN	SILANGIT	1	9.6	1	2.4											12	Rp 567,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 6,217,000
27	PADANG	ROKOT	1	9.6	1	2.4											12	Rp 567,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 6,217,000
28	BATAM	MATAK	1	9.6	1	2.4											12	Rp 567,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 6,217,000
29	BATAM	NATUNA	1	9.6	1	2.4											12	Rp 567,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 6,217,000
30	BATAM	DABO	1	9.6	1	2.4											12	Rp 567,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 6,217,000
31	AMBON	SAUMLAKI	1	9.6	1	2.4											12	Rp 567,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 6,217,000
32	AMBON	LANGGUR	1	9.6	1	2.4											12	Rp 567,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 6,217,000
33	KUPANG	SABU	1	9.6	1	2.4											12	Rp 567,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 6,217,000
34	KUPANG	BAJAWA	1	9.6	1	2.4											12	Rp 567,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 6,217,000
35	KUPANG	ENDE	1	9.6	1	2.4											12	Rp 567,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 6,217,000
36	KUPANG	LABUHAN BAJO	1	9.6	1	2.4											12	Rp 567,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 6,217,000
37	KUPANG	MAUMERE	1	9.6	1	2.4											12	Rp 567,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 6,217,000
38	KUPANG	ALOR	1	9.6	1	2.4											12	Rp 567,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 6,217,000
39	KUPANG	TAMBOLAKA	1	9.6	1	2.4											12	Rp 567,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 6,217,000
40	KUPANG	WAINGAPU	1	9.6	1	2.4											12	Rp 567,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 6,217,000
41	TERNATE	BULI	1	9.6	1	2.4											12	Rp 567,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 6,217,000
42	TERNATE	GALELA	1	9.6	1	2.4											12	Rp 567,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 6,217,000
43	TERNATE	LABUHA	1	9.6	1	2.4											12	Rp 567,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 6,217,000
44	TERNATE	KAO	1	9.6	1	2.4											12	Rp 567,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 6,217,000
45	PALU	LUWUK	1	9.6	1	2.4											12	Rp 567,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 6,217,000
46	SURABAYA	JANGLI (SEMARANG)							1	9.6							9.6	Rp 453,600	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 6,103,600

NO	KONEKSI		JUMLAH APLIKASI & BANDWIDTH (KBPS)														TOTAL BANDWIDTH	HARGA BANDWIDTH	MANAGE SERVICE	BIAYA STATION	BIAYA DISMANTLE	TOTAL PER BULAN
	DARI	KE	QTY	DS	QTY	TTY	QTY	RO	QTY	ER	QTY	RC	QTY	ADSB	QTY	ATN						
47	CILACAP	YOGYAKARTA											1	64			64	Rp 3,024,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 8,674,000
48	JATSC (HF)	MATSC (HF)							1	128							128	Rp 6,048,000	Rp 2,250,000	Rp 2,950,000	Rp 450,000	Rp 11,698,000

JUMLAH =	Rp	354,208,800
Penyesuaian Negosiasi =	Rp	793,000
Jumlah Hasil Setelah Negosiasi =	Rp	353,415,800
PPN 10% =	Rp	35,341,580
TOTAL SETELAH NEGOSIASI =	Rp	388,757,380

Terbilang : *tiga ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah*

NILAI KONTRAK SELAMA 1 (SATU) TAHUN

TOTAL = Rp 4,665,088,560

Terbilang : *empat milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah*

Jakarta, 20 Februari 2017
PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA

BKU
PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA

ROHADI
Direktur Utama

RINCIAN PERUBAHAN LINK PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA

NO	KONEKSI		JUMLAH APLIKASI & BANDWIDTH (KBPS)														TOTAL	KETERANGAN
	DARI	KE	QTY	DS	QTY	TTY	QTY	RD	QTY	ER	QTY	RC	QTY	ADSB	QTY	ATN	BANDWIDTH	
1	ATAMBUA	KUPANG							1	9,6							9,6	
2	SORONG	MATSC							1	9,6							9,6	
3	SORONG	KAIMANA	1	9,6	1	2,4											12	
4	ATAMBUA	MATSC							1	9,6							9,6	
5	SURABAYA	JANGLI							1	9,6							9,6	
6	MERAUKE (HF)	MATSC (HF)							1	128							128	
7	BANJARMASIN (HF)	MATSC (HF)							1	128							128	
8	MANADO (HF)	MATSC (HF)							1	128							128	
9	MERAUKE (HF)	SENTANI (HF)							1	128							128	
10	SEMARANG	CIREBON							1	9,6							9,6	
11	JANGLI (Semarang)	JOGJA											1	64			64	
12	KUPANG	DENPASAR											1	64			64	
13	JATSC	MATSC							1	128							128	DITAMBAHKAN
14	KUPANG	DENPASAR																DIHILANGKAN
15	TARAKAN	MATSC																DIHILANGKAN
16	TIMIKA	MATSC																DIHILANGKAN
17	PONTIANAK	MATSC					1	19,2									19,2	
18	SENTANI	MATSC											1	64			64	
19	MEDAN	SIBOLGA							1	9,6							9,6	
20	WAINGAPU	DENPASAR											1	64			64	DIPINDAHKAN CILACAP - YOGYAKARTA
21	PANGKALANBUN	JATSC																DIHILANGKAN
22	SURABAYA	JATSC					1	19,2									19,2	
23	BANJARMASIN	JATSC					1	19,2									19,2	
24	BANJARMASIN	BALIK PAPAN																DIHILANGKAN
25	TARAKAN	BALIK PAPAN																DIHILANGKAN
26	TIMIKA	SENTANI							1	9,6			1	64			73,6	
27	ELIJIM	SENTANI											1	64			64	
28	WAMENA	SENTANI											1	64			64	
29	DEKAI	SENTANI											1	64			64	
30	OKSIBIL	SENTANI											1	64			64	
31	BORME	SENTANI											1	64			64	
32	SENGGEH	SENTANI											1	64			64	
33	MEDAN	SIBOLGA	1	9,6	1	2,4											12	
34	MEDAN	GN. SITOLI	1	9,6	1	2,4											12	
35	MEDAN	AEK GODANG	1	9,6	1	2,4											12	
36	MEDAN	SILANGIT	1	9,6	1	2,4											12	
37	PADANG	ROKOT	1	9,6	1	2,4											12	
38	BATAM	MATAK	1	9,6	1	2,4											12	
39	BATAM	NATUNA	1	9,6	1	2,4											12	
40	BATAM	DABO	1	9,6	1	2,4											12	
41	AMBON	SAUMLAKI	1	9,6	1	2,4											12	
42	AMBON	LANGGUR	1	9,6	1	2,4											12	
43	KUPANG	SABU	1	9,6	1	2,4											12	
44	KUPANG	BAJAWA	1	9,6	1	2,4											12	
45	KUPANG	ENDE	1	9,6	1	2,4											12	
46	KUPANG	LABUHAN BAJO	1	9,6	1	2,4											12	
47	KUPANG	MAUMERE	1	9,6	1	2,4											12	
48	KUPANG	ALOR	1	9,6	1	2,4											12	
49	KUPANG	TAMBOLAKA	1	9,6	1	2,4											12	
50	KUPANG	WANGIAPU	1	9,6	1	2,4											12	
51	TERNATE	BULI	1	9,6	1	2,4											12	
52	TERNATE	GALELA	1	9,6	1	2,4											12	
53	TERNATE	LABUHA	1	9,6	1	2,4											12	
54	TERNATE	KAO	1	9,6	1	2,4											12	
55	PALU	LUWUK	1	9,6	1	2,4											12	

AirNav Indonesia

Perum LPPNPI
Gedung Airnav Indonesia
Jalan Ir. H. Juanda, Karanganyar, Neglasari
Tangerang 15121 - Indonesia
Telepon: 021-55915000
Fax: 021-55915100
Website: www.airnavindonesia.co.id

ADDENDUM II

Nomor : PJJ.06.02.03/00/LPPNPI/ADD-2/05/2017/018.3
Tanggal : 29 Mei 2017

a t a s

PERJANJIAN
PENGADAAN JASA BERLANGGANAN PENAMBAHAN JARINGAN KOMUNIKASI DOMESTIK DI PERUM LPPNPI

Nomor : **PJJ.06.02.03/00/LPPNPI/12/2016/078**
Tanggal : **28 Desember 2016**
Pelaksana : **PT Bintang Komunikasi Utama**

PERUSAHAAN UMUM
LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA

ADDENDUM II

Nomor : **PJJ.06.02.03/00/LPPNPI/ADD-2/05/2017/018.3**
Tanggal : **29 Mei 2017**

a t a s

PERJANJIAN
PENGADAAN JASA BERLANGGANAN PENAMBAHAN JARINGAN KOMUNIKASI DOMESTIK DI PERUM LPPNPI

Nomor : **PJJ.06.02.03/00/LPPNPI/12/2016/078**
Tanggal : **28 Desember 2016**
Pelaksana : **PT Bintang Komunikasi Utama**

Addendum Kedua atas Perjanjian Pengadaan Jasa Berlangganan Penambahan Jaringan Komunikasi Domestik Di Perum LPPNPI (selanjutnya disebut "**Addendum II**") ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin tanggal dua puluh sembilan bulan Mei Tahun dua ribu tujuh belas (**29-05-2017**) di Tangerang, oleh dan antara :

I. **YURLIS HASIBUAN**, selaku Plt. Direktur Teknik Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas berdasarkan Surat Perintah Ketua Dewan Pengawas Perum LPPNPI Nomor KEP.014/DW/IV/2017, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan **PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA**, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda, Karang Anyar, Neglasari, Tangerang 15121 – Indonesia, yang anggaran dasarnya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 77 Tahun 2012 Tanggal 13 September 2012;
- untuk selanjutnya disebut **"PIHAK PERTAMA"**.

II. **ROHADI**, selaku Direktur Utama PT Bintang Komunikasi Utama, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **PT BINTANG KOMUNIKASI UTAMA,** beralamat di Graha BKU, Jalan Jengki Raya Nomor 43, RT 008/RW 002, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur 13650 - Indonesia, yang anggaran dasarnya tertuang dalam Akta Pendirian Nomor : 01 Tanggal 10 Desember 2001 yang dibuat dihadapan H Djoko Oetoro SH, MM, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Nomor : C-16055 HT.01.01. TH 2003 Tanggal 11 Juli 2003 dan perubahannya yang terakhir dalam Akta Nomor : 20 Tanggal 16 September 2015 yang dibuat dihadapan Jhonni Marihotua Sianturi SH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor : AHU-AH.01.03-0965363 Tanggal 17 September 2015;
- untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

	Pihak I	Pihak II
Paraf		

Para Pihak tetap bertindak dalam jabatannya tersebut di atas terlebih dahulu memperhatikan dan menerangkan hal-hal sebagai berikut :

A. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah Para Pihak dalam Perjanjian Nomor : PJJ.06.02.03/00/LPPNPI/12/2016/078 Tanggal 28 Desember 2016 beserta Addendum pertama Nomor : PJJ.06.02.03/00/LPPNPI/ADD-1/02/2017/010 Tanggal 23 Februari 2017 (selanjutnya disebut "**Perjanjian Induk**"), dimana PIHAK KEDUA telah ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Jasa Berlangganan Penambahan Jaringan Komunikasi Domestik Di Perum LPPNPI;

B. Bahwa Perjanjian tersebut di atas telah dilakukan dan diterima untuk Jangka Waktu Pemasangan terhitung mulai tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017 dan Jangka Waktu Sewa selama 365 hari kalender terhitung mulai Tanggal Koneksi sebagaimana ditetapkan di Berita Acara Layak Operasi yang ditandatangani oleh Para Pihak;

C. Bahwa PIHAK KEDUA telah dikenakan Denda keterlambatan akibat keterlambatan penyerahan jadwal uji coba peralatan dan jaringan serta pelaksanaan SAT. Sehubungan dengan adanya rencana optimalisasi penggunaan jaringan dan adanya optimalisasi permintaan koneksi jaringan baru guna mendukung operasi pelayanan pengendalian lalu lintas udara, maka PIHAK PERTAMA atas pertimbangan bisnis yang baik bermaksud mengadakan pekerjaan kurang pada Lingkup Pekerjaan dengan pengurangan jumlah aplikasi, koneksi dan bandwidth pada jaringan komunikasi.

D. Bahwa Para Pihak telah saling setuju dan mufakat untuk mengadakan perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf C di atas berdasarkan Berita Acara Evaluasi Perubahan Pekerjaan Nomor : BAC.042/00/05/2017-TF Tanggal 23 Mei 2017 dan Berita Acara Perubahan Pekerjaan Nomor : BAC.06.02.01/00/LPPNPI/05/2017/081.1 Tanggal 26 Mei 2017, dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan mengadakan Addendum kedua.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak telah saling setuju dan mufakat untuk melaksanakan Addendum II terhadap Perjanjian Induk dengan memakai aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Para Pihak setuju dan sepakat mengadakan pekerjaan kurang terhadap Lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Induk dengan mengacu pada rincian pekerjaan kurang dalam dokumen-dokumen yang menjadi Lampiran Addendum II ini.

	Pihak I	Pihak II
Paraf		

Pasal 2

Dokumen-dokumen acuan pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) Perjanjian Induk tentang Dasar Pelaksanaan Pekerjaan ditambahkan dokumen-dokumen yang merupakan lampiran dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Addendum II ini, yaitu sebagai berikut :

a. Berita Acara Perubahan Pekerjaan Nomor : BAC.06.02.01/00/LPPNPI/05/2017/081.1 Tanggal 26 Mei 2017 beserta lampirannya yang memuat rincian anggaran biaya perubahan;
b. Berita Acara Evaluasi Perubahan Pekerjaan Nomor : BAC.042/00/05/2017-TF Tanggal 23 Mei 2017 beserta lampirannya yang memuat data-data pendukung perubahan Pekerjaan;
c. Surat PIHAK PERTAMA Nomor : 08.03.05/00/LPPNPI/05/2017/478.2 Tanggal 22 Mei 2017 Perihal Hasil Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pekerjaan beserta lampirannya.

Pasal 3

Mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) tentang Biaya Pekerjaan pada Perjanjian Induk, sehingga Pasal 4 ayat (1) Perjanjian Induk untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

"(1) Biaya pelaksanaan/penyelesaian Pekerjaan pada Perjanjian ini telah disepakati oleh Para Pihak sebesar Rp 4.550.591.760,- (empat miliar lima ratus lima puluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh Rupiah) sudah termasuk PPN, semua bea dan biaya-biaya lainnya dengan rincian anggaran biaya sebagaimana dijelaskan pada lampiran Perjanjian ini."

Pasal 4

Mengubah ketentuan Pasal 5 ayat (1) tentang Tata Cara Pembayaran pada Perjanjian Induk, sehingga Pasal 5 ayat (1) Perjanjian Induk untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

"(1) Biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) Perjanjian ini akan dibayarkan secara bertahap selama Jangka Waktu Sewa jaringan komunikasi domestik oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp 379.215.980,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh Rupiah) per bulan sudah termasuk Pajak setelah Jasa Pemeliharaan Peralatan, Dokumentasi berikut Jasa Berlangganan dan Aplikasi seluruh Lokasi Pekerjaan dilaksanakan PIHAK KEDUA dengan baik dan benar dan berdasarkan realisasi pemakaian setiap jenis aplikasi link jaringan komunikasi sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Layak Operasi yang ditandatangani Para Pihak.

	Pihak I	Pihak II
Paraf		

Pasal 5

(1) Semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Induk yang tidak mengalami perubahan dengan dibuatnya Addendum II ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.

(2) Istilah yang diawali dengan huruf besar, yang digunakan tetapi tidak terdefinisikan pada Addendum II ini memiliki arti yang sama dengan yang ada pada Perjanjian Induk.

(3) Terhadap pelanggaran atas syarat dan ketentuan dalam Addendum II ini diberlakukan Denda dan Sanksi atau ketentuan Pasal lainnya sebagaimana disepakati Para Pihak dalam Perjanjian Induk.

(4) Bea Meterai untuk mengadakan Addendum II ini menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 6

Para Pihak sepakat bahwa Addendum II ini beserta lampirannya dan seluruh dokumen lainnya yang dibuat dan/atau akan dibuat di kemudian hari merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Induk.

Demikian Addendum II ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak di Tangerang, pada hari, tanggal, bulan, serta tahun sebagaimana tersebut dimuka, telah dibaca, diteliti dengan seksama serta telah dipahami dan dimengerti Para Pihak, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
BKU PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA	METERAI TEMPEL 85334AEF559408081 6000 ENAM RIBU RUPIAH
ROHADI Direktur Utama	**YURLIS HASIBUAN** Plt. Direktur Teknik

ADDENDUM II

Nomor : **PJJ.06.02.03/00/LPPNPI/ADD-2/05/2017/018.3**
Tanggal : **29 Mei 2017**

a t a s

PERJANJIAN
PENGADAAN JASA BERLANGGANAN PENAMBAHAN JARINGAN KOMUNIKASI DOMESTIK DI PERUM LPPNPI

Nomor : **PJJ.06.02.03/00/LPPNPI/12/2016/078**
Tanggal : **28 Desember 2016**
Pelaksana : **PT Bintang Komunikasi Utama**